



**Peraturan Menteri Keuangan
Nomor : 141/PMK.02/2010
Tanggal : 11 Agustus 2010**

**Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 123/PMK.02/2010 Tentang**

Standar Biaya Khusus 2011





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 141/PMK.02/2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 123/PMK.02/2010 TENTANG STANDAR BIAYA KHUSUS TAHUN
ANGGARAN 2011



Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Anggaran
2010



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR ISI

	Halaman
1. Badan Pemeriksa Keuangan (004)	1
2. Mahkamah Agung (005)	2
3. Kejaksaan Agung (006)	3
4. Sekretariat Negara (007)	5
5. Dalam Negeri (010)	6
6. Luar Negeri (011)	7
7. Pertahanan (012)	9
8. Hukum dan Hak Asasi Manusia (013)	15
9. Keuangan (015)	16
10. Pertanian (018)	17
11. Perindustrian (019)	18
12. Energi dan Sumber Daya Mineral (020)	19
13. Perhubungan (022)	20
14. Pendidikan Nasional (023)	21
15. Agama (025)	22
16. Sosial (027)	24
17. Pekerjaan Umum (033)	27
18. Badan Usaha Milik Negara (041)	28
19. Lingkungan Hidup (043)	29
20. Perencanaan Pembangunan Nasional (055)	30
21. Badan Pengawasan Obat dan Makanan (063)	31
22. Badan Narkotika Nasional (066)	32
23. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (068)	33
24. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (075)	34
25. Mahkamah Konstitusi (077)	35
26. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (079)	36
27. Badan Tenaga Nuklir Nasional (080)	37
28. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (082)	38
29. Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional (083)	39
30. Badan Pengawas Tenaga Nuklir (085)	40
31. Arsip Nasional Republik Indonesia (087)	41
32. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (089)	42
33. Pemuda dan Olahraga (092)	48
34. Komisi Yudisial (100)	49
35. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (104)	50
36. Kehutanan (029)	51
37. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (106)	52



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 141/PMK.02/2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 123/PMK.02/2010
TENTANG STANDAR BIAYA KHUSUS TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.02/2010 telah ditetapkan Standar Biaya Khusus Tahun Anggaran 2011 yang digunakan sebagai batas tertinggi dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2011;
 - b. bahwa mengingat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.02/2010 tentang Standar Biaya Khusus Tahun Anggaran 2011, belum mengatur Standar Biaya Khusus Tahun Anggaran 2011 untuk Kementerian Negara/Lembaga pada Badan Pemeriksa Keuangan, Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Keuangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Sosial, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan Narkotika Nasional, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, Mahkamah Konstitusi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Badan Tenaga Nuklir Nasional, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional, Badan Pengawas Tenaga Nuklir, Arsip Nasional Republik Indonesia, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Kementerian Pemuda dan Olah Raga, Komisi Yudisial, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, Kementerian Kehutanan, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, serta adanya penambahan Standar Biaya Khusus Tahun Anggaran 2011 pada Kementerian Agama, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.02/2010 tentang Standar Biaya Khusus Tahun Anggaran 2011;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.02/2010 tentang Standar Biaya Khusus Tahun Anggaran 2011;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.02/2010 tentang Standar Biaya Khusus Tahun Anggaran 2011;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 123/PMK.02/2010 TENTANG STANDAR BIAYA KHUSUS TAHUN ANGGARAN 2011.

Pasal I

Mengubah Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.02/2010 tentang Standar Biaya Khusus Tahun Anggaran 2011 sehingga menjadi sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal II

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Agustus 2010

MENTERI KEUANGAN,

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 11 Agustus 2010.

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

ttd.

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 387

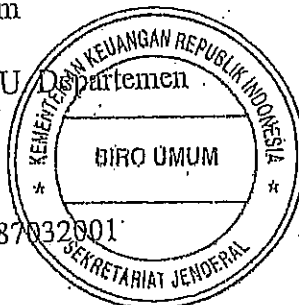
Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum

u.b.

Pj. Kepala Bagian T.U. Departemen

Adelina Sirait

NIP 196606031987032801





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR: 141/PMK.02/2010
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 123/PMK.02/2010 TENTANG
STANDAR BIAYA KHUSUS TAHUN ANGGARAN 2011

STANDAR BIAYA KHUSUS TAHUN ANGGARAN 2011

Kementerian Negara/Lembaga : Badan Pemeriksa Keuangan (004)

No	Unit Eselon I dan Jenis Keluaran Kegiatan yang menjadi SBK	Volume dan Satuan Ukur	Biaya (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
004.02	Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara SBK Indeks Biaya Keluaran			
1	Diklat Orientasi ke-BPK-an	1 Angkatan	248.290.550	Diklat 40 Orang Peserta Dilaksanakan Dalam Waktu 9 Hari
2	Diklat Anggota Tim Pemeriksa	1 Angkatan	1.546.619.050	Diklat 40 Orang Peserta Dilaksanakan Dalam Waktu 83 Hari
3	Diklat Ketua Tim Pemeriksa	1 Angkatan	737.587.900	Diklat 40 Orang Peserta Dilaksanakan Dalam Waktu 15 Hari
4	Diklat Pengendali Tim Pemeriksa	1 Angkatan	626.844.500	Diklat 40 Orang Peserta Dilaksanakan Dalam Waktu 10 Hari
5	Diklat Peningkatan Ketrampilan	1 Angkatan	554.379.400	Diklat 40 Orang Peserta Dilaksanakan Dalam Waktu 4 Hari
6	Diklat Sertifikasi Akuntan Publik Untuk Partner	1 Angkatan	98.374.000	Diklat 40 Orang Peserta Dilaksanakan Dalam Waktu 2 Hari
7	Diklat Sertifikasi Akuntan Publik Untuk Pemeriksa	1 Angkatan	147.950.500	Diklat 40 Orang Peserta Dilaksanakan Dalam Waktu 5 Hari
8	Diklat Pengelolaan dan Pemeriksaan Keuangan Negara Kelas 1 Hari	1 Angkatan	47.617.500	Diklat 40 Orang Peserta Dilaksanakan Dalam Waktu 1 Hari
9	Diklat Pengelolaan dan Pemeriksaan Keuangan Negara Kelas 2 Hari	1 Angkatan	72.506.000	Diklat 40 Orang Peserta Dilaksanakan Dalam Waktu 2 Hari
10	Diklat Pengelolaan dan Pemeriksaan Keuangan Negara Kelas 3 Hari	1 Angkatan	100.529.500	Diklat 40 Orang Peserta Dilaksanakan Dalam Waktu 3 Hari



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Kementerian Negara/Lembaga : Mahkamah Agung (005)

NO	Unit Eselon I dan Jenis Keluaran Kegiatan yang menjadi SBK	Volume dan Satuan Ukur	Biaya (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
005.01	Badan Urusan Administrasi SBK Total Biaya Keluaran			
	1 Laporan Kepegawaian	4 Laporan	869.425.000	
	2 Aparatur Yang Mengikuti Pembinaan Teknis Perbendaharaan	208 Orang	1.036.408.194	
	3 Laporan Pengelolaan Pelaksanaan Anggaran	6 Laporan	1.000.536.000	
	4 Laporan Pengelolaan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP)	6 Laporan	1.814.956.800	
	5 Laporan Penatausahaan, Pembukuan Verifikasi dan Pelaksanaan Anggaran	4 Laporan	932.361.800	
	6 Laporan Penerimaan Negara Bukan Pajak	5 Laporan	676.570.300	
	7 Dokumen Rencana Program dan Anggaran Mahkamah Agung RI	4 Dokumen	3.835.065.000	
	8 Aparatur Yang Mengikuti Bimbingan Teknis Perencanaan dan Anggaran	82 Orang	635.115.000	
	9 Kebijakan Bidang Kelembagaan Mahkamah Agung RI	5 Rekomendasi	600.000.000	
005.02	Kepaniteraan SBK Total Biaya Keluaran			
	1 Kajian di Bidang Hukum dan Organisasi	7 Kajian	2.876.728.000	
005.03	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum SBK Total Biaya Keluaran			
	1 Tenaga Teknis Peradilan Umum Yang Mengikuti Bimbingan Kompetensi	260 Orang	2.173.230.000	
005.04	Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama SBK Total Biaya Keluaran			
	1 Tenaga Teknis di Peradilan Agama Yang Mengikuti Bimbingan Kompetensi	235 Orang	2.314.198.600	
	2 Aparatur Yang Mengikuti Bimbingan Teknis Administrasi Peradilan Agama	180 Orang	1.835.905.000	
005.06	Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan SBK Total Biaya Keluaran			
	1 Sumber Daya Manusia yang Mengikuti Diklat Struktural dan Non-Struktural	2037 Orang	14.300.000.000	
	2 Dokumen Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran	3 Dokumen	679.870.000	
	3 Laporan Kegiatan dan Pembinaan	3 Laporan	510.472.500	
005.07	Badan Pengawasan SBK Total Biaya Keluaran			
	1 LHP Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan Wilayah I	55 Laporan	1.992.790.000	
	2 LHP Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan Wilayah II	61 Laporan	2.124.234.000	
	3 LHP Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan Wilayah III	55 Laporan	2.422.033.000	
	4 LHP Pelaksanaan Teknis, Administrasi Peradilan, Administrasi Umum, Penanganan Pengaduan Wilayah IV	37 Laporan	2.089.252.000	



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Kementerian Negara/Lembaga : Kejaksaan Agung (006)

No	Unit Eselon I dan Jenis Keluaran Kegiatan yang menjadi SBK	Volume dan Satuan Ukur	Biaya (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
006.01	Kejaksaan Agung			
	SBK Indeks Biaya Keluaran			
1	Pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksya	1 Orang	46.023.000	Diklat dilaksanakan dalam waktu 7 bulan
2	Pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Penyelidikan Kasus Intelijen	1 Orang	27.300.000	Diklat dilaksanakan dalam waktu 2 bulan
3	Pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus	1 Orang	14.759.000	Diklat dilaksanakan dalam waktu 1 bulan
4	Pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum	1 Orang	14.759.000	Diklat dilaksanakan dalam waktu 1 bulan
5	Pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Penanganan Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	1 Orang	14.759.000	Diklat dilaksanakan dalam waktu 1 bulan
6	Perkara Tindak Pidana Umum Yang diselesaikan dalam Tahap Pra Penuntutan pada Kejaksaan Agung	1 Perkara	15.250.000	Dilaksanakan dalam waktu 2 bulan
7	Perkara Pidana Umum Yang diselesaikan Dalam Tahap Penuntutan Pada Kejaksaan Agung	1 Perkara	25.325.000	Dilaksanakan dalam waktu 3 bulan
8	Perkara Tindak Pidana Umum Yang diselesaikan dalam Tahap Pra Penuntutan pada Kejaksaan Tinggi	1 Perkara	13.475.000	Dilaksanakan dalam waktu 2 bulan
9	Perkara Tindak Pidana Umum Yang diselesaikan dalam Tahap Penuntutan pada Kejaksaan Tinggi	1 Perkara	18.300.000	Dilaksanakan dalam waktu 3 bulan
10	Perkara Tindak Pidana Umum Yang diselesaikan dalam Tahap Pra Penuntutan pada Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	1 Perkara	11.225.000	Dilaksanakan dalam waktu 2 bulan
11	Perkara Tindak Pidana Umum Yang diselesaikan dalam Tahap Penuntutan pada Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	1 Perkara	15.300.000	Dilaksanakan dalam waktu 3 bulan
12	Perkara Perdata Yang diselesaikan pada Kejaksaan Agung	1 Perkara	46.927.000	Dilaksanakan dalam waktu 3 bulan
13	Perkara Tata Usaha Negara Yang diselesaikan pada Kejaksaan Agung	1 Perkara	46.927.000	Dilaksanakan dalam waktu 3 bulan
14	Perkara Pemulihan dan Perlindungan Hak yang diselesaikan pada Kejaksaan Agung	1 Perkara	46.927.000	Dilaksanakan dalam waktu 3 bulan
15	Perkara Perdata dan TUN yang diselesaikan pada Kejaksaan Tinggi	1 Perkara	30.430.000	Dilaksanakan dalam waktu 3 bulan
16	Perkara Perdata dan TUN yang diselesaikan di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	1 Perkara	24.043.000	Dilaksanakan dalam waktu 3 bulan
17	Laporan Hasil Kegiatan intelijen bidang ekonomi, keuangan dan Pembangunan	1 LHK	25.137.000	Dilaksanakan dalam waktu 2 bulan
18	Laporan Hasil Kegiatan Produksi dan sarana terhadap Pelaksanaan Intelijen	1 LHK	25.137.000	Dilaksanakan dalam waktu 2 bulan
19	Laporan Hasil Kegiatan Intelijen Bidang Ideologi, Sosial, Politik, Pertahanan Keamanan dan Ketertiban Umum	1 LHK	25.137.000	Dilaksanakan dalam waktu 2 bulan
20	Laporan Hasil Kegiatan Penyelidikan /pengamanan/penggalangan kasus intelijen di Kejaksaan Tinggi	1 LHK	20.137.000	Dilaksanakan dalam waktu 2 bulan
21	Laporan Hasil Kegiatan Penyelidikan /pengamanan/penggalangan kasus intelijen di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	1 LHK	15.137.000	Dilaksanakan dalam waktu 2 bulan
22	Penerangan Hukum pada Kejaksaan Agung	1 Lembaga	35.880.000	Peserta 150 orang , Dilaksanakan dalam waktu 1 hari
23	Penerangan Hukum pada Kejaksaan Tinggi	1 Lembaga	17.030.000	Peserta 100 orang , Dilaksanakan dalam waktu 1 hari
24	Penerangan Hukum pada Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	1 Lembaga	15.210.000	Peserta 100 orang , Dilaksanakan dalam waktu 1 hari
25	Kelompok Masyarakat Yang diberi Penyuluhan Hukum	1 Kelompok Masyarakat	9.400.000	Peserta 100 orang , Dilaksanakan dalam waktu 1 hari



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Kementerian Negara/Lembaga : Kejaksaan Agung (006)

No	Unit Eselon I dan Jenis Keluaran Kegiatan yang menjadi SBK	Volume dan Satuan Ukur	Biaya (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
26	Penanganan Laporan Pengaduan Masyarakat Bidang kepegawaian dan Pelaksanaan Tugas-tugas Umum pada Kejaksaan Agung	1 Lapdu	14.937.000	Dilaksanakan dalam waktu 3 bulan
27	Penanganan Laporan Pengaduan Masyarakat Bidang Keuangan, Perlengkapan dan Proyek Pembangunan pada Kejaksaan Agung	1 Lapdu	14.937.000	Dilaksanakan dalam waktu 3 bulan
28	Penanganan Laporan Pengaduan Masyarakat Bidang Pelaksanaan Kegiatan Operasi Intelijen pada Kejaksaan Agung	1 Lapdu	14.937.000	Dilaksanakan dalam waktu 3 bulan
29	Penanganan Laporan Pengaduan Masyarakat Bidang Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Agung	1 Lapdu	14.937.000	Dilaksanakan dalam waktu 3 bulan
30	Penanganan Laporan Pengaduan Masyarakat Bidang Perkara Tindak Pidana Khusus, Tindak Pidana Korupsi dan Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Agung	1 Lapdu	14.937.000	Dilaksanakan dalam waktu 3 bulan
31	Laporan Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti dan diselesaikan terhadap penyalahgunaan wewenang di Daerah	1 Lapdu	11.025.000	Dilaksanakan dalam waktu 3 bulan
32	Kasus Tindak Pidana Korupsi yang Diselesaikan dalam Tahap Penyelidikan di Kejaksaan Agung	1 Kasus	27.975.000	Dilaksanakan dalam waktu 2 bulan
33	Perkara Pidana Korupsi Yang diselesaikan Dalam Tahap Penyidikan di Kejaksaan Agung	1 Perkara	68.450.000	Dilaksanakan dalam waktu 3 bulan
34	Perkara Tindak Pidana Korupsi Yang diselesaikan dalam Tahap Pra Penuntutan di Kejaksaan Agung	1 Perkara	10.700.000	Dilaksanakan dalam waktu 1 bulan
35	Perkara Tindak Pidana Korupsi Yang diselesaikan dalam Tahap Penuntutan di Kejaksaan Agung	1 Perkara	33.750.000	Dilaksanakan dalam waktu 3 bulan
36	Kasus Tindak Pidana Korupsi yang Diselesaikan pada Tahap Penyelidikan di Kejaksaan Tinggi	1 kasus	19.975.000	Dilaksanakan dalam waktu 2 bulan
37	Perkara Pidana Korupsi Yang diselesaikan pada Tahap Penyidikan di Kejaksaan Tinggi	1 perkara	55.450.000	Dilaksanakan dalam waktu 3 bulan
38	Perkara Tindak Pidana Korupsi yang Diselesaikan pada Tahap Prapenuntutan di Kejaksaan Tinggi	1 Perkara	9.700.000	Dilaksanakan dalam waktu 1 bulan
39	Perkara Pidana Korupsi Yang diselesaikan pada Tahap Penuntutan di Kejaksaan Tinggi	1 Perkara	29.000.000	Dilaksanakan dalam waktu 3 bulan
40	Kasus Tindak Pidana Korupsi yang Diselesaikan pada Tahap Penyelidikan di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	1 kasus	14.975.000	Dilaksanakan dalam waktu 2 bulan
41	Perkara Pidana Korupsi Yang diselesaikan Dalam Tahap Penyidikan di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	1 Perkara	35.450.000	Dilaksanakan dalam waktu 3 bulan
42	Perkara Tindak Pidana Korupsi yang Diselesaikan pada Tahap Prapenuntutan di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	1 Perkara	9.700.000	Dilaksanakan dalam waktu 1 bulan
43	Perkara Tindak Pidana Korupsi Yang diselesaikan pada Tahap Penuntutan di Kejaksaan di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	1 Perkara	28.500.000	Dilaksanakan dalam waktu 3 bulan
44	Perkara Tindak Pidana Khusus Yang diselesaikan dalam Tahap Pra Penuntutan di Kejaksaan Agung	1 Perkara	8.200.000	Dilaksanakan dalam waktu 1 bulan
45	Perkara Tindak Pidana Khusus Yang diselesaikan dalam Tahap Penuntutan di Kejaksaan Agung	1 Perkara	29.450.000	Dilaksanakan dalam waktu 3 bulan
46	Perkara Tindak Pidana Khusus Yang diselesaikan dalam Tahap Pra Penuntutan di Kejaksaan Tinggi	1 Perkara	7.350.000	Dilaksanakan dalam waktu 1 bulan
47	Perkara Tindak Pidana Khusus Yang diselesaikan dalam Tahap Penuntutan di Kejaksaan Tinggi	1 Perkara	25.550.000	Dilaksanakan dalam waktu 3 bulan
48	Perkara Tindak Pidana Khusus Yang diselesaikan dalam Tahap Pra Penuntutan di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	1 Perkara	7.350.000	Dilaksanakan dalam waktu 1 bulan
49	Perkara Tindak Pidana Khusus Yang diselesaikan dalam Tahap Penuntutan di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	1 Perkara	20.200.000	Dilaksanakan dalam waktu 3 bulan
50	Perkara Pelanggaran HAM yang berat yang diselesaikan dalam Tahap Pra penyidikan	1 Perkara	8.425.000	Dilaksanakan dalam waktu 1 bulan
51	Perkara Pelanggaran HAM yang berat Yang diselesaikan Dalam Tahap Penyidikan	1 Perkara	35.450.000	Dilaksanakan dalam waktu 3 bulan
52	Perkara Pelanggaran HAM yang berat Yang diselesaikan dalam Tahap Pra Penuntutan	1 Perkara	8.750.000	Dilaksanakan dalam waktu 1 bulan
53	Perkara Pelanggaran HAM yang berat Yang diselesaikan dalam Tahap Penuntutan	1 Perkara	24.750.000	Dilaksanakan dalam waktu 3 bulan



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Kementerian Negara/Lembaga : Sekretariat Negara (007)

No	Unit Eselon I dan Jenis Keluaran Kegiatan yang menjadi SBK	Volume dan Satuan Ukur	Biaya (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
007.01	Sekretariat Negara SBK Total Biaya Keluaran 1 Audit Kinerja/ Audit Tujuan Tertentu 2 Keikutsertaan dalam Pendidikan dan Pelatihan	4 Laporan 4 Pelatihan	140.210.000 695.837.000	



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Kementerian Negara/Lembaga : Dalam Negeri (010)

No	Unit Eselon I dan Jenis Keluaran Kegiatan yang menjadi SBK	Volume dan Satuan Ukur	Biaya (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
010.01	Sekretariat Jenderal SBK Total Biaya Keluaran			
	1 Dokumen Bidang Kebijakan Strategik	1 dokumen	650.000.000	Penyusunan Kebijakan dan program strategik Pimpinan Kemendagri
	2 Seleksi Inovative Government	4 Pemda	1.200.000.000	Pemilihan Pemerintah daerah berinovative Tingkat Nasional
010.02	Inspektorat Jenderal SBK Total Biaya Keluaran			
	1 Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja Bidang Pengawasan Fungsional Wilayah I	11 Laporan	3.193.652.000	Pemeriksaan Reguler kinerja di unit Kemendagri dan penyelenggaraan Pemerintah daerah
	2 Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja Bidang Pengawasan Fungsional Wilayah II	11 Laporan	2.862.162.000	Pemeriksaan Reguler kinerja di unit Kemendagri dan penyelenggaraan Pemerintah daerah
	3 Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja Bidang Pengawasan Fungsional Wilayah III	11 Laporan	2.734.636.000	Pemeriksaan Reguler kinerja di unit Kemendagri dan penyelenggaraan Pemerintah daerah
	4 Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja Bidang Pengawasan Fungsional Wilayah IV	12 Laporan	2.855.210.000	Pemeriksaan Reguler kinerja di unit Kemendagri dan penyelenggaraan Pemerintah daerah
010.07	Direktorat Jenderal Otonomi Daerah SBK Total Biaya Keluaran			
	1 Rekomendasi DPOD Bidang Pemerintahan dan Perimbangan	4 Rekomendasi	5.100.000.000	
010.11	Badan Pendidikan dan Pelatihan SBK Total Biaya Keluaran			
	1 Angkatan Diklat Bidang Pemerintahan dan Politik	14 Angkatan	1.153.675.000	Diklat teknis 35 orang
	2 Angkatan Diklat Bidang Keuangan Daerah dan Teknis	3 Angkatan	195.475.000	Diklat teknis 35 orang
	3 Angkatan Diklat Fungsional Binaan Kemendagri dan Diklat Kepemimpinan	4 Angkatan	262.575.000	Diklat Fungsional 35 orang
	4 Angkatan Diklat Bidang Pembangunan dan Kependudukan	12 Angkatan	783.050.000	Diklat teknis 35 orang
	5 Angkatan Diklat Bidang Kader dan Pengembangan Kepemimpinan	5 Angkatan	782.635.000	Diklat teknis 35 orang



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Kementerian Negara/Lembaga : Luar Negeri (011)

No	Unit Eselon I dan Jenis Keluaran Kegiatan yang menjadi SBK	Volume dan Satuan Ukur	Biaya (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
011.01	Sekretariat Jenderal SBK Indeks Biaya Keluaran			
	1 Nota Hasil Verifikasi (NHV)	1 NHV	2.902.535	
	2 SPM Perwakilan RI	1 Lembar	79.629	
	3 Rekomendasi Pengembangan Diklat	1 Rekomendasi	125.335.143	
	4 Lulusan Diklat Khusus PDLN	1 PDLN/	12.272.327	
	5 Diplomat Asing Berwawasan Indonesia	1 Diplomat Asing / Angkatan	83.281.567	
	6 Lulusan Diklat Khusus Non Diplomatik dan Teknis Perwakilan Non PNS	1 Orang / Angkatan	5.541.632	
	7 Sekolah Indonesia di Luar Negeri Yang Berkualitas	1 Sekolah	49.336.000	
	8 Lulusan Diklat Penjurangan Diplomatik	1 Diplomat/ Angkatan	56.297.704	
011.03	Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa SBK Indeks Biaya Keluaran			
	1 Majalah Mengenai Peluang Pasar Produk Indonesia di Kawasan Amerika & Eropa dan Indonesia Regional Economic Potentials	1 Eksemplar	286.461	
011.04	Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN SBK Indeks Biaya Keluaran			
	1 Institusi /Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah yang Memiliki Pemahaman Tentang ASEAN Charter di Bidang HAM, Terorisme, dan Trafficking	1 Institusi	111.509.000	
	2 Institusi Pemerintah dan Non Pemerintah yang Memiliki Pemahaman Teknis Sektoral dalam Kerjasama Ekonomi ASEAN	1 Institusi	66.792.000	
	3 Institusi Pendidikan yang Memiliki Pemahaman Tentang ASEAN Charter di Bidang Sosial Budaya	1 Institusi Pendidikan	150.997.000	
	4 Rekomendasi atas Inisiatif yang Terkait dengan Prioritas Kerjasama ASEAN dengan Mitrawicara	1 Rekomendasi	226.350.000	
011.06	Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik SBK Indeks Biaya Keluaran			
	1 Edisi Terbitan Majalah/Buletin Diplomasi Publik	1 Eksemplar	14.592	
	2 Buku yang Mendukung Penguatan Citra Indonesia	1 Buku	334.081	
	3 VCD/DVD yang Mendukung Penguatan Citra Indonesia	1 Keping	250.746	
011.09	Inspektorat Jenderal SBK Indeks Biaya Keluaran			
	1 Laporan Hasil Pemeriksaan Wilayah I Dalam Negeri	1 Laporan	65.599.667	
	2 Laporan Hasil Pemeriksaan Wilayah II Dalam Negeri	1 Laporan	63.173.000	
	3 Laporan Hasil Pemeriksaan Wilayah III Dalam Negeri	1 Laporan	62.093.000	
	4 Laporan Hasil Pemeriksaan Wilayah IV Dalam Negeri	1 Laporan	81.599.667	
	5 Laporan Koordinasi Perencanaan Audit Wilayah I Dengan Instansi Terkait	1 Laporan	90.514.333	
	6 Laporan Koordinasi Perencanaan Audit Wilayah II Dengan Instansi Terkait	1 Laporan	96.717.000	
	7 Laporan Koordinasi Perencanaan Audit Wilayah III Dengan Instansi Terkait	1 Laporan	91.701.000	
	8 Laporan Koordinasi Perencanaan Audit Wilayah IV Dengan Instansi Terkait	1 Laporan	108.761.000	
	9 Rekomendasi Pengawasan Wilayah I digunakan bagi Pengambilan Keputusan	1 Rekomendasi	102.732.000	
	10 Rekomendasi Pengawasan Wilayah II digunakan bagi Pengambilan Keputusan	1 Rekomendasi	110.142.000	
	11 Rekomendasi Pengawasan Wilayah III digunakan bagi Pengambilan Keputusan	1 Rekomendasi	120.184.000	
	12 Rekomendasi Pengawasan Wilayah IV digunakan bagi Pengambilan Keputusan	1 Rekomendasi	130.540.000	



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Kementerian Negara/Lembaga : Luar Negeri (011)

No	Unit Eselon I dan Jenis Keluaran Kegiatan yang menjadi SBK	Volume dan Satuan Ukur	Biaya (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
011.11	Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Luar Negeri			
	SBK Total Biaya Keluaran			
1	Kajian Kebijakan Luar Negeri RI yang Terkait Isu Polugri di Kawasan Amerika dan Eropa	1 Kajian	1.589.593.000	
2	Kajian Kebijakan Luar Negeri RI yang Terkait Isu Polugri di Kawasan Asia Pasifik, Timur Tengah dan Afrika	1 Kajian	1.515.422.000	
3	Kajian Kebijakan Luar Negeri RI Yang Terkait Isu Organisasi Regional dan Internasional	1 Kajian	1.536.593.000	
	SBK Indeks Biaya Keluaran			
1	Rekomendasi Kebijakan Luar Negeri RI yang Terkait Isu Polugri di Kawasan	1 Rekomendasi	157.517.000	
2	Rekomendasi Kebijakan Luar Negeri RI yang Terkait isu Polugri di Kawasan Asia Pasifik, Timur Tengah dan Afrika	1 Rekomendasi	157.517.000	
3	Rekomendasi Kebijakan Luar Negeri RI Terkait Isu Organisasi Regional dan Internasional	1 Rekomendasi	157.517.000	
4	Rekomendasi Forum Komunikasi Kelitbangan Terkait Isu Polugri	1 Rekomendasi	378.034.000	
5	Debriefing Report Mantan Kepala Perwakilan RI	1 Debriefing Report	108.645.000	



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Kementerian Negara/Lembaga : Pertahanan (012)

No	Unit Eselon I dan Jenis Keluaran Kegiatan yang menjadi SBK	Volume dan Satuan Ukur	Biaya (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
012.01	Kementerian Pertahanan			
	SBK Indeks Biaya Keluaran			
1	Lulusan Diklat Minu	1 Orang	2.870.000	Orang per bulan
2	Lulusan Diklat Teknisi Komputer	1 Orang	2.870.000	Orang per bulan
3	Lulusan Diklat Programmer Komputer	1 Orang	2.870.000	Orang per bulan
4	Lulusan Diklat Web Design	1 Orang	2.870.000	Orang per bulan
5	Lulusan Diklat Pengamanan Jaringan	1 Orang	2.870.000	Orang per bulan
6	Lulusan Kursus Intensif Bahasa Arab, Jerman, Prancis, Rusia, Jepang, Mandarin	1 Orang	2.807.000	Orang per bulan
7	Lulusan Kursus Intensif Bahasa Inggris Pasukan Perdamaian	1 Orang	2.807.000	Orang per bulan
8	Lulusan Kursus Intensif Bahasa Inggris Wilayah	1 Orang	2.807.000	Orang per bulan
9	Lulusan Kursus Intensif Bahasa Indonesia Tk. Dasar	1 Orang	4.017.000	Orang per bulan
10	Lulusan Tactical English Course	1 Orang	2.807.000	Orang per bulan
11	Lulusan Kursus Intensif Dasar Instruktur Bahasa Inggris	1 Orang	2.807.000	Orang per bulan
12	Lulusan Kursus Intensif Bahasa Inggris	1 Orang	2.807.000	Orang per bulan
13	Lulusan Kursus Persiapan Casis Sesko	1 Orang	4.017.000	Orang per bulan
14	Lulusan Kursus Persiapan Sesko Angkatan	1 Orang	4.017.000	Orang per bulan
15	Lulusan Kursus Manajemen Pengadaan dan Bendaharawan Materiil Pertahanan	1 Orang	3.160.000	Orang per bulan
16	Lulusan Kursus Perwira Penelitian dan Pengembangan Pertahanan	1 Orang	3.160.000	Orang per bulan
17	Lulusan Kursus Dasar Manajemen Pertahanan	1 Orang	3.160.000	Orang per bulan
18	Lulusan Kursus Pengawasan dan Pemeriksaan Pertahanan dan Teknik Auditor Pertahanan	1 Orang	3.160.000	Orang per bulan
19	Lulusan Kursus Kepemimpinan Manajemen Pertahanan	1 Orang	3.992.500	Orang per bulan
20	Lulusan Kursus Manajemen Perencanaan dan Penganggaran Pertahanan	1 Orang	3.160.000	Orang per bulan
21	Lulusan Kursus Fungsi Penelitian dan Pengembangan Pertahanan	1 Orang	3.160.000	Orang per bulan
22	Lulusan Kursus Bintara Administrasi Keuangan Pertahanan	1 Orang	2.365.000	Orang per bulan
23	Lulusan Kursus Bintara Pembukuan Pertahanan	1 Orang	2.365.000	Orang per bulan
24	Lulusan Kursus Administrasi Keuangan	1 Orang	3.160.000	Orang per bulan
25	Lulusan Kursus Bendaharawan Keuangan	1 Orang	3.160.000	Orang per bulan
26	Lulusan Kursus Juru Bayar Pertahanan	1 Orang	2.365.000	Orang per bulan
27	Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. I	1 Laporan	2.318.000	Biaya per perkara
28	Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. Banding	1 Laporan	1.200.000	Biaya per perkara
29	Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. Kasasi	1 Laporan	1.200.000	Biaya per perkara
30	Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. PK	1 Laporan	1.509.000	Biaya per perkara
31	Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. I	1 Laporan	7.822.000	Biaya per perkara
32	Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. Banding	1 Laporan	2.400.000	Biaya per perkara
33	Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. Kasasi	1 Laporan	1.700.000	Biaya per perkara
34	Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. PK	1 Laporan	3.509.000	Biaya per perkara
35	Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat Tk. I	1 Laporan	10.502.000	Biaya per perkara
36	Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pembanding Tk. Banding	1 Laporan	4.272.000	Biaya per perkara
37	Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. Kasasi	1 Laporan	5.364.000	Biaya per perkara
38	Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. PK	1 Laporan	7.114.000	Biaya per perkara
39	Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat Tk. I	1 Laporan	10.087.000	Biaya per perkara
40	Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Terbanding Tk. Banding	1 Laporan	3.922.000	Biaya per perkara
41	Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. Kasasi	1 Laporan	4.859.000	Biaya per perkara
42	Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. PK	1 Laporan	6.409.000	Biaya per perkara



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Kementerian Negara/Lembaga : Pertahanan (012)

No	Unit Eselon I dan Jenis Keluaran Kegiatan yang menjadi SBK	Volume dan Satuan Ukur	Biaya (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
012.21	Markas Besar TNI			
	SBK Indeks Biaya Keluaran			
1	Laporan Penuntutan dan Pengolahan Perkara Pidana Militer	1 Laporan	1.404.000	Biaya per perkara
2	Laporan Penuntutan dan Pengolahan Pelanggaran Pidana Militer	1 Laporan	334.000	Biaya per perkara
3	Laporan Penuntutan dan Pengolahan Upaya Banding Perkara Pidana Militer	1 Laporan	235.000	Biaya per perkara
4	Laporan Penuntutan dan Pengolahan Upaya Kasasi Perkara Pidana Militer	1 Laporan	235.000	Biaya per perkara
5	Laporan Penuntutan dan Pengolahan Peninjauan Kembali Pidana Militer	1 Laporan	881.000	Biaya per perkara
6	Laporan Pembinaan Napi	1 Laporan	14.000	Biaya per perkara
7	Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. I	1 Laporan	2.318.000	Biaya per perkara
8	Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. Banding	1 Laporan	1.200.000	Biaya per perkara
9	Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. Kasasi	1 Laporan	1.200.000	Biaya per perkara
10	Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. PK	1 Laporan	1.509.000	Biaya per perkara
11	Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. I	1 Laporan	7.822.000	Biaya per perkara
12	Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. Banding	1 Laporan	2.400.000	Biaya per perkara
13	Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. Kasasi	1 Laporan	1.700.000	Biaya per perkara
14	Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. PK	1 Laporan	3.509.000	Biaya per perkara
15	Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat Tk. I	1 Laporan	10.502.000	Biaya per perkara
16	Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pembanding Tk. Banding	1 Laporan	4.272.000	Biaya per perkara
17	Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. Kasasi	1 Laporan	5.364.000	Biaya per perkara
18	Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. PK	1 Laporan	7.114.000	Biaya per perkara
19	Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat Tk. I	1 Laporan	10.087.000	Biaya per perkara
20	Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Terbanding Tk. Banding	1 Laporan	3.922.000	Biaya per perkara
21	Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. Kasasi	1 Laporan	4.859.000	Biaya per perkara
22	Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. PK	1 Laporan	6.409.000	Biaya per perkara
23	Peserta Penggelaran Satgas Operasi Tempur TNI	1 Orang	154.500	Orang per hari
24	Peserta Penggelaran Satgas Operasi Pemukul TNI	1 Orang	160.000	Orang per hari
25	Peserta Penggelaran Satgas Operasi Intelijen Taktis TNI	1 Orang	308.000	Orang per hari
26	Peserta Operasi Rutin Integratif	1 Orang	46.500	Orang per hari
27	Peserta Operasi Intelijen Rutin	1 Orang	146.000	Orang per hari
28	Peserta Operasi Intelijen Rutin Taktis	1 Orang	86.000	Orang per hari
29	Peserta Penggelaran Satgas Ops Intelijen Strategis TNI	1 Orang	339.000	Orang per hari
30	Calon Perwira Karier (PAPK)	1 Orang	11.500.000	Biaya per orang
31	Calon PSDP Penerbang	1 Orang	20.000.000	Biaya per orang
32	Calon Mahasiswa Beasiswa PAPK	1 Orang	11.500.000	Biaya per orang
33	Lulusan Dikma Candradimuka Capratar	1 Orang	7.097.000	Orang per bulan
34	Lulusan Dikma Candradimuka Pratar	1 Orang	4.245.500	Orang per bulan
35	Lulusan Dikma Candradimuka Koptar	1 Orang	4.483.200	Orang per bulan
36	Lulusan Dikma PSDP Penerbang	1 Orang	7.817.400	Orang per bulan
37	Lulusan Diklan PSDP Penerbang	1 Orang	6.999.000	Orang per bulan
38	Lulusan Dikma Pa PK Pria	1 Orang	6.045.000	Orang per bulan
39	Lulusan Dikma Pa PK Wanita	1 Orang	6.367.000	Orang per bulan
40	Peserta Latihan Bersama Internasional di Luar Negeri	1 Orang	820.000	Orang per hari
41	Peserta Latihan Bersama Internasional di Dalam Negeri	1 Orang	106.000	Orang per hari



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Kementerian Negara/Lembaga : Pertahanan (012)

No	Unit Eselon I dan Jenis Keluaran Kegiatan yang menjadi SBK	Volume dan Satuan Ukur	Biaya (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
012.22	Markas Besar TNI AD			
	SBK Indeks Biaya Keluaran			
1	Laporan Penyidikan Perkara Hukum Prajurit Tk. Ringan	1 Laporan	1.052.000	Biaya per perkara
2	Laporan Penyidikan Perkara Hukum Prajurit Tk. Sedang	1 Laporan	1.277.000	Biaya per perkara
3	Laporan Penyidikan Perkara Hukum Prajurit Tk. Berat	1 Laporan	2.557.000	Biaya per perkara
4	Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. I	1 Laporan	2.318.000	Biaya per perkara
5	Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. Banding	1 Laporan	1.200.000	Biaya per perkara
6	Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. Kasasi	1 Laporan	1.200.000	Biaya per perkara
7	Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. PK	1 Laporan	1.509.000	Biaya per perkara
8	Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. I	1 Laporan	7.822.000	Biaya per perkara
9	Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. Banding	1 Laporan	2.400.000	Biaya per perkara
10	Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. Kasasi	1 Laporan	1.700.000	Biaya per perkara
11	Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. PK	1 Laporan	3.509.000	Biaya per perkara
12	Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat Tk. I	1 Laporan	10.502.000	Biaya per perkara
13	Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pembanding Tk. Banding	1 Laporan	4.272.000	Biaya per perkara
14	Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. Kasasi	1 Laporan	5.364.000	Biaya per perkara
15	Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. PK	1 Laporan	7.114.000	Biaya per perkara
16	Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat Tk. I	1 Laporan	10.087.000	Biaya per perkara
17	Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Terbanding Tk. Banding	1 Laporan	3.922.000	Biaya per perkara
18	Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. Kasasi	1 Laporan	4.859.000	Biaya per perkara
19	Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. PK	1 Laporan	6.409.000	Biaya per perkara
20	Peserta Operasi Intelijen Taktis TNI	1 Orang	273.000	Orang per hari
21	Peserta Latihan Kematraan	1 Orang	50.400	Orang per hari
22	Peserta Latihan Bersama Internasional di Luar Negeri	1 Orang	820.583	Orang per hari
23	Peserta Latihan Bersama Internasional di Dalam Negeri	1 Orang	106.000	Orang per hari
24	Lulusan Dikma Sertar	1 Orang	4.874.559	Orang per bulan
25	Lulusan Dikma Sermadatar	1 Orang	5.102.309	Orang per bulan
26	Lulusan Dikma Sermatular	1 Orang	5.495.107	Orang per bulan
27	Lulusan Dikma Secaba Pria Matra Darat	1 Orang	4.002.520	Orang per bulan
28	Lulusan Dikma Secaba Wanita Matra Darat	1 Orang	4.194.600	Orang per bulan
29	Lulusan Dikma Secatam Matra Darat	1 Orang	3.758.480	Orang per bulan
30	Calon Taruna Matra Darat	1 Orang	18.000.000	Biaya per orang
31	Calon Bintara Matra Darat	1 Orang	4.000.000	Biaya per orang
32	Calon Tantama Matra Darat	1 Orang	2.500.000	Biaya per orang
33	Lulusan Diksargolan Perwira Matra Darat	1 Orang	4.400.000	Biaya per orang
34	Lulusan Diksargolan Pa PK Matra Darat	1 Orang	3.800.000	Biaya per orang
35	Lulusan Diksargolan Bintara Matra Darat	1 Orang	2.468.000	Biaya per orang
36	Lulusan Diksargolan Tamtama Matra Darat	1 Orang	2.299.000	Biaya per orang
37	Lulusan Dik Secapa Reguler Matra Darat	1 Orang	2.895.500	Orang per bulan
38	Lulusan Dik Secaba Reguler Matra Darat	1 Orang	2.594.375	Orang per bulan
39	Lulusan Secapareg Matra Darat	1 Orang	1.300.000	Biaya per orang
40	Lulusan Secabareg Matra Darat	1 Orang	1.200.000	Biaya per orang
41	Lulusan Seskoad	1 Orang	3.725.909	Orang per bulan
42	Lulusan Selapa Matra Darat	1 Orang	3.017.000	Orang per bulan
43	Peserta Seskoad	1 Orang	5.000.000	Biaya per orang
44	Peserta Selapa Matra Darat	1 Orang	3.100.000	Biaya per orang
45	Lulusan Dikbangspes/PNS sederajat Perwira Matra Darat	1 Orang	2.761.000	Orang per bulan
46	Lulusan Dikbangspes Bintara/PNS sederajat Matra Darat	1 Orang	2.250.000	Orang per bulan



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Kementerian Negara/Lembaga : Pertahanan (012)

No	Unit Eselon I dan Jenis Keluaran Kegiatan yang menjadi SBK	Volume dan Satuan Ukur	Biaya (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
012.23	47 Lulusan Dikbangspes Tamtama/PNS sederajat Matra Darat Markas Besar TNI AL	1 Orang	2.150.000	Orang per bulan
	SBK Indeks Biaya Keluaran			
	1 Laporan Penyidikan Perkara Hukum Prajurit Tk. Ringan	1 Laporan	1.052.000	Biaya per Perkara
	2 Laporan Penyidikan Perkara Hukum Prajurit Tk. Sedang	1 Laporan	1.277.000	Biaya per Perkara
	3 Laporan Penyidikan Perkara Hukum Prajurit Tk. Berat	1 Laporan	2.557.000	Biaya per Perkara
	4 Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. I	1 Laporan	2.318.000	Biaya per Perkara
	5 Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. Banding	1 Laporan	1.200.000	Biaya per Perkara
	6 Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. Kasasi	1 Laporan	1.200.000	Biaya per Perkara
	7 Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. PK	1 Laporan	1.509.000	Biaya per Perkara
	8 Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. I	1 Laporan	7.822.000	Biaya per Perkara
	9 Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. Banding	1 Laporan	2.400.000	Biaya per Perkara
	10 Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. Kasasi	1 Laporan	1.700.000	Biaya per Perkara
	11 Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. PK	1 Laporan	3.509.000	Biaya per Perkara
	12 Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat Tk. I	1 Laporan	10.502.000	Biaya per Perkara
	13 Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pembanding Tk. Banding	1 Laporan	4.272.000	Biaya per Perkara
	14 Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. Kasasi	1 Laporan	5.364.000	Biaya per Perkara
	15 Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. PK	1 Laporan	7.114.000	Biaya per Perkara
	16 Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat Tk. I	1 Laporan	10.087.000	Biaya per Perkara
	17 Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Terbanding Tk. Banding	1 Laporan	3.922.000	Biaya per Perkara
	18 Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. Kasasi	1 Laporan	4.859.000	Biaya per Perkara
	19 Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. PK	1 Laporan	6.409.000	Biaya per Perkara
	20 Peserta Penggelaran Satgas Ops Intelejen Taktis TNI	1 Orang	308.000	Orang per hari
	21 Peserta Latihan Operasi Matra TNI AL	1 Orang	50.400	Orang per hari
	22 Peserta Latihan Bersama Internasional di Luar Negeri	1 Orang	820.000	Orang per hari
	23 Peserta Latihan Bersama Internasional di Dalam Negeri	1 Orang	106.000	Orang per hari
	24 Calon Kadet	1 Orang	18.000.000	Biaya per orang
	25 Calon Bintara Matra Laut	1 Orang	4.000.000	Biaya per orang
	26 Calon Tamtama Matra Laut	1 Orang	2.500.000	Biaya per orang
	27 Peserta Seskoal	1 Orang	5.500.000	Biaya per orang
	28 Peserta Diklapa	1 Orang	3.100.000	Biaya per orang
	29 Peserta Diktukpa	1 Orang	1.300.000	Biaya per orang
	30 Peserta Diktukba	1 Orang	1.200.000	Biaya per orang
	31 Lulusan Dikma Serkad	1 Orang	5.782.346	Orang per bulan
	32 Lulusan Dikma Sermadadak	1 Orang	5.964.612	Orang per bulan
	33 Lulusan Dikma Sermatukad	1 Orang	6.490.480	Orang per bulan
	34 Lulusan Diksargolan Pa PK Matra Laut	1 Orang	3.915.000	Orang per bulan
	35 Lulusan Dikma Secaba Pria Matra Laut	1 Orang	5.759.434	Orang per bulan
	36 Lulusan Dikma Secaba Wanita Matra Laut	1 Orang	5.824.015	Orang per bulan
	37 Lulusan Diksargolan Bintara Matra Laut	1 Orang	2.675.000	Orang per bulan
	38 Lulusan Dikma Secatam Matra Laut	1 Orang	5.524.034	Orang per bulan
	39 Lulusan Diksargolan Tamtama Matra Laut	1 Orang	2.428.000	Orang per bulan
	40 Lulusan Dikseskoal	1 Orang	3.800.000	Orang per bulan
	41 Lulusan Diklapa	1 Orang	3.100.000	Orang per bulan
	42 Lulusan Diktukpa	1 Orang	2.900.000	Orang per bulan
	43 Lulusan Diktukba	1 Orang	2.600.000	Orang per bulan
44 Lulusan Dikbangspes Perwira/PNS sederajat Matra Laut	1 Orang	2.900.000	Orang per bulan	
45 Lulusan Dikbangspes Bintara/PNS sederajat Matra Laut	1 Orang	2.350.000	Orang per bulan	



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

Kementerian Negara/Lembaga : Pertahanan (012)

No	Unit Eselon I dan Jenis Keluaran Kegiatan yang menjadi SBK	Volume dan Satuan Ukur	Biaya (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
	46 Lulusan Dikbangspes Tamtama/PNS sederajat Matra Laut	1 Orang	2.250.000	Orang per bulan
	47 Lulusan Diksus Manajemen strategik Matra Laut	1 Orang	3.405.000	Orang per bulan
	48 Lulusan Diksus Penerbangan Matra Laut	1 Orang	3.510.000	Orang per bulan
	49 Lulusan Diksus Brevet Matra Laut	1 Orang	3.180.000	Orang per bulan
012.24	Markas Besar TNI AU			
	SBK Indeks Biaya Keluaran			
	1 Laporan Penyidikan Perkara Hukum Prajurit Tk. Ringan	1 Laporan	1.052.000	Biaya per perkara
	2 Laporan Penyidikan Perkara Hukum Prajurit Tk. Sedang	1 Laporan	1.277.000	Biaya per perkara
	3 Laporan Penyidikan Perkara Hukum Prajurit Tk. Berat	1 Laporan	2.557.000	Biaya per perkara
	4 Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. I	1 Laporan	2.318.000	Biaya per perkara
	5 Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. Banding	1 Laporan	1.200.000	Biaya per perkara
	6 Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. Kasasi	1 Laporan	1.200.000	Biaya per perkara
	7 Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Militer Tk. PK	1 Laporan	1.509.000	Biaya per perkara
	8 Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. I	1 Laporan	7.822.000	Biaya per perkara
	9 Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. Banding	1 Laporan	2.400.000	Biaya per perkara
	10 Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. Kasasi	1 Laporan	1.700.000	Biaya per perkara
	11 Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Pidana Umum Tk. PK	1 Laporan	3.509.000	Biaya per perkara
	12 Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Penggugat Tk. I	1 Laporan	10.502.000	Biaya per perkara
	13 Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pembanding Tk. Banding	1 Laporan	4.272.000	Biaya per perkara
	14 Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. Kasasi	1 Laporan	5.364.000	Biaya per perkara
	15 Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Pemohon Tk. PK	1 Laporan	7.114.000	Biaya per perkara
	16 Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Tergugat Tk. I	1 Laporan	10.087.000	Biaya per perkara
	17 Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Terbanding Tk. Banding	1 Laporan	3.922.000	Biaya per perkara
	18 Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. Kasasi	1 Laporan	4.859.000	Biaya per perkara
	19 Laporan Bantuan dan Nasihat Hukum Perkara Perdata/TUN Termohon Tk. PK	1 Laporan	6.409.000	Biaya per perkara
	20 Peserta Ops Intelejen Taktis TNI	1 Orang	308.000	Orang per hari
	21 Peserta Latihan Kematraan	1 Orang	50.400	Orang per hari
	22 Peserta Latihan Bersama Internasional di Luar Negeri	1 Orang	820.000	Orang per hari
	23 Peserta Latihan Bersama Internasional di Dalam Negeri	1 Orang	106.000	Orang per hari
	24 Calon Karbol	1 Orang	18.000.000	Biaya per orang
	25 Calon Bintara Matra Udara	1 Orang	4.000.000	Biaya per orang
	26 Calon Tamtama Matra Udara	1 Orang	2.500.000	Biaya per orang
	27 Peserta Sesko Matra Udara	1 Orang	5.500.000	Biaya per orang
	28 Peserta Sekkau	1 Orang	3.100.000	Biaya per orang
	29 Peserta Setukpa	1 Orang	1.300.000	Biaya per orang
	30 Peserta Setukba	1 Orang	1.200.000	Biaya per orang
	31 Lulusan Dikma Serkar	1 Orang	5.773.000	Biaya per orang
	32 Lulusan Dikma Sermadakar	1 Orang	6.025.000	Biaya per orang
	33 Lulusan Dikma Sermatukar	1 Orang	6.869.000	Biaya per orang
	34 Lulusan Diksargolan Perwira Matra Udara	1 Orang	4.500.000	Biaya per orang
	35 Lulusan Dikma Secaba Pria Matra Udara	1 Orang	4.040.000	Biaya per orang
	36 Lulusan Dikma Secaba Wanita Matra Udara	1 Orang	4.210.000	Biaya per orang
	37 Lulusan Diksargolan Bintara Matra Udara	1 Orang	2.500.000	Biaya per orang
	38 Lulusan Dikma Secatam Matra Udara	1 Orang	3.900.000	Biaya per orang
	39 Lulusan Diksargolan Tamtama Matra Udara	1 Orang	2.300.000	Biaya per orang
	40 Lulusan Dikma Sekbang/Seknav	1 Orang	6.253.000	Biaya per orang
	41 Lulusan Dikma SIN/SIP	1 Orang	8.970.000	Biaya per orang
	42 Lulusan Dikma Seskoau	1 Orang	4.030.000	Biaya per orang
	43 Lulusan Dikma Sekkau	1 Orang	3.100.000	Biaya per orang



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

Kementerian Negara/Lembaga : Pertahanan (012)

No	Unit Eselon I dan Jenis Keluaran Kegiatan yang menjadi SBK	Volume dan Satuan Ukur	Biaya (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
44	Lulusan Dikma Setukpa	1 Orang	2.900.000	Biaya per orang
45	Lulusan Dikma Setukba	1 Orang	2.600.000	Biaya per orang
46	Lulusan Dikbangspes Perwira/PNS sederajat Matra Udara	1 Orang	2.900.000	Biaya per orang
47	Lulusan Dikbangspes Bintara/PNS sederajat Matra Udara	1 Orang	2.350.000	Biaya per orang
48	Lulusan Dikbangspes/PNS sederajat Tamtama Matra Udara	1 Orang	2.250.000	Biaya per orang



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

Kementerian Negara/Lembaga : Hukum dan Hak Asasi Manusia (013)

No	Unit Eselon I dan Jenis Keluaran Kegiatan yang menjadi SBK	Volume dan Satuan Ukur	Biaya (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
013.08	Ditjen Peraturan dan Perundang-undangan SBK Indeks Biaya Keluaran			
1	Rancangan Undang-Undang	1 RUU dan R Perpu	391.350.000	Penyusunan Naskah RUU
2	Rancangan Peraturan Perundang-Undangan di bawah Undang-Undang	1 RPP, R Pres, R Permen	345.520.000	Penyusunan Naskah RPP
3	Rancangan Undang-Undang yang Dibahas di DPR	1 Undang - undang	781.720.000	Pembahasan RUU dan Penyusunan DIM
013.11	Badan Penelitian dan Pengembangan HAM SBK Indeks Biaya Keluaran			
1	Laporan Penelitian Hak Sipil dan Politik	1 Laporan	259.244.000	Penelitian Hak-hak Sipil dan Politik
2	Laporan Penelitian Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya	1 Laporan	259.244.000	Penelitian Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya
3	Laporan Penelitian Transformasi Konflik	1 Laporan	259.244.000	Penelitian Transformasi Konflik
4	Laporan Penelitian Hak Kelompok Khusus	1 Laporan	259.244.000	Penelitian Hak-hak Kelompok Khusus
5	Rekomendasi Kebijakan Hak Sipil dan Politik	1 Dokumen	244.540.000	Evaluasi Hak-hak Sipil dan Politik
6	Rekomendasi Kebijakan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya	1 Dokumen	244.540.000	Evaluasi Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya
7	Rekomendasi Kebijakan Transformasi Konflik	1 Dokumen	244.540.000	Evaluasi Transformasi Konflik
8	Rekomendasi Kebijakan Hak Kelompok Khusus	1 Dokumen	244.540.000	Evaluasi Hak-hak Kelompok Khusus



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

Kementerian Negara/Lembaga : Keuangan (015)

NO	Unit Eselon I dan Jenis Keluaran Kegiatan yang menjadi SBK	Volume dan Satuan Ukur	Biaya (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
015.02	Inspektorat Jenderal			
	SBK Total Biaya Keluaran			
1	Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat I	1 Laporan	3.619.384.000	
2	Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat II	1 Laporan	3.576.548.000	
3	Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat III	1 Laporan	3.528.952.000	
4	Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat IV	1 Laporan	3.486.379.000	
5	Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat V	1 Laporan	3.443.505.000	
6	Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat VI	1 Laporan	3.626.060.000	
7	Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat VII	1 Laporan	3.085.275.000	
8	Laporan Hasil Pengawasan Bidang Investigasi	1 Laporan	3.698.806.000	
9	Laporan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Pengawasan	1 Laporan	261.721.000	
015.03	Direktorat Jenderal Anggaran			
	SBK Total Biaya Keluaran			
1	Peraturan Bidang Penganggaran	4 PMK	2.586.000.000	
015.11	Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan			
	SBK Indeks Biaya Keluaran			
1	Jumlah Peserta Diklat 5 Hari	1 Peserta	1.861.833	Penyelenggaraan diklat 5 hari
2	Kajian Akademis	1 Laporan	181.007.500	SBK kajian akademis
3	Jumlah Peserta Diklat 12 Hari	1 Peserta	2.845.667	Penyelenggaraan diklat 12 hari
4	Jurnal BPPK	1 Jurnal	156.096.000	SBK jurnal BPPK
5	Jumlah Peserta Diklat 16 Hari	1 Peserta	3.455.500	Penyelenggaraan diklat 16 hari
6	Jumlah Peserta Diklat 19 Hari	1 Peserta	3.839.500	Penyelenggaraan diklat 19 hari



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

Kementerian Negara/Lembaga : Pertanian (018)

No	Unit Eselon I dan Jenis Keluaran Kegiatan yang menjadi SBK	Volume dan Satuan Ukur	Biaya (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
018.02	Inspektorat Jenderal			
	SBK Total Biaya Keluaran			
1	Audit Perencanaan pada Satker Lingkup Setjen, Ditjen Hortikultura serta Badan Penyuluhan dan pengembangan SDM Pertanian.	3 laporan	403.464.375	
2	Audit Kinerja pada Satker Lingkup Setjen, Ditjen Hortikultura serta Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian.	96 satker	3.341.443.125	
3	Reviu Laporan Keuangan Eselon I pada Satker Lingkup Setjen, Ditjen Hortikultura serta Badan Penyuluhan dan pengembangan SDM Pertanian serta Reviu Laporan Keuangan Kementerian.	8 laporan	583.364.375	
4	Evaluasi terhadap LAKIP Eselon I pada Satker Lingkup Setjen, Ditjen Hortikultura serta Badan Penyuluhan dan pengembangan SDM Pertanian serta Evaluasi LAKIP Kementerian.	4 laporan	488.944.375	
5	Evaluasi Kegiatan Strategis pada Satker Lingkup Setjen, Ditjen Hortikultura serta Badan Penyuluhan dan pengembangan SDM Pertanian.	1 laporan	329.346.875	
6	Pengawasan Kegiatan Strategis pada Satker Lingkup Setjen, Ditjen Hortikultura serta Badan Penyuluhan dan pengembangan SDM Pertanian.	1 laporan	988.040.625	
7	Audit Perencanaan pada Satker Lingkup Ditjen Tanaman Pangan, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian dan Badan Ketahanan Pangan.	3 laporan	403.464.375	
8	Audit Kinerja pada Satker Lingkup Ditjen Tanaman Pangan, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian dan Badan Ketahanan Pangan.	96 satker	3.341.443.125	
9	Reviu Laporan Keuangan Eselon I pada Satker Lingkup Ditjen Tanaman Pangan, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian dan Badan Ketahanan Pangan.	6 laporan	412.404.375	
10	Evaluasi terhadap LAKIP Eselon I pada Satker Lingkup Ditjen Tanaman Pangan, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian dan Badan Ketahanan Pangan.	3 laporan	403.464.375	
11	Evaluasi Kegiatan Strategis pada Satker Lingkup Ditjen Tanaman Pangan, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian dan Badan Ketahanan Pangan.	1 laporan	329.346.875	
12	Pengawasan Kegiatan Strategis pada Satker Lingkup Ditjen Tanaman Pangan, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian dan Badan Ketahanan Pangan.	1 laporan	988.040.625	
13	Audit Perencanaan pada Satker Lingkup Ditjen Perkebunan, Ditjen PPHP dan Badan Litbang Pertanian.	3 laporan	403.464.375	
14	Audit Kinerja pada Satker Lingkup Ditjen Perkebunan, Ditjen PPHP dan Badan Litbang Pertanian.	96 satker	3.341.443.125	
15	Reviu Laporan Keuangan Eselon I pada Satker Lingkup Ditjen Perkebunan, Ditjen PPHP dan Badan Litbang Pertanian	6 laporan	412.404.375	
16	Evaluasi terhadap LAKIP Eselon I pada Satker Lingkup Ditjen Perkebunan, Ditjen PPHP dan Badan Litbang Pertanian	3 laporan	403.464.375	
17	Evaluasi Kegiatan Strategis pada Satker Lingkup Ditjen Perkebunan, Ditjen PPHP dan Badan Litbang Pertanian	1 laporan	329.346.875	
18	Pengawasan Kegiatan Strategis pada Satker Lingkup Ditjen Perkebunan, Ditjen PPHP dan Badan Litbang Pertanian	1 laporan	988.040.625	
19	Audit Perencanaan pada Satker Lingkup Itjen, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Badan Karantina Pertanian	3 laporan	403.464.375	
20	Audit Kinerja pada Satker Lingkup Itjen, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Badan Karantina Pertanian	96 satker	3.341.443.125	
21	Reviu Laporan Keuangan Eselon I pada Satker Lingkup Itjen, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Badan Karantina Pertanian	6 laporan	412.404.375	
22	Evaluasi terhadap LAKIP Eselon I pada Satker Lingkup Itjen, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Badan Karantina Pertanian	3 laporan	403.464.375	
23	Evaluasi Kegiatan Strategis pada Satker Lingkup Itjen, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Badan Karantina Pertanian	1 laporan	329.346.875	
24	Pengawasan Kegiatan Strategis pada Satker Lingkup Itjen, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Badan Karantina Pertanian	1 laporan	988.040.625	
25	Audit Khusus / Investigasi	36 kasus	1.510.250.625	
26	Audit Tujuan Tertentu	2 laporan	1.109.470.000	



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

Kementerian Negara/Lembaga : Perindustrian (019)

NO	Unit Eselon I dan Jenis Keluaran Kegiatan yang menjadi SBK	Volume dan Satuan Ukur	Biaya (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
019.06	Inspektorat Jenderal			
	SBK Total Biaya Keluaran			
1	Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat I	4 Laporan	1.737.710.000	42 Unit Kerja
2	Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat II	4 Laporan	1.777.010.000	42 Unit Kerja
3	Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat III	4 Laporan	1.725.404.000	42 Unit Kerja
4	Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat IV	4 Laporan	1.723.600.000	42 Unit Kerja
5	Laporan Hasil Reviu Keuangan/Barang Milik Negara Unit Pusat Laporan dan Vertikal Inspektorat I	1 Laporan	652.874.000	15 Unit / 2 Semester
6	Laporan Hasil Reviu Keuangan/Barang Milik Negara Unit Pusat Laporan dan Vertikal Inspektorat II	1 Laporan	648.860.000	14 Unit / 2 Semester
7	Laporan Hasil Reviu Keuangan/Barang Milik Negara Unit Pusat Laporan dan Vertikal Inspektorat III	1 Laporan	646.404.000	15 Unit / 2 Semester
8	Laporan Hasil Reviu Keuangan/Barang Milik Negara Unit Pusat Laporan dan Vertikal Inspektorat IV	1 Laporan	680.400.000	15 Unit / 2 Semester
9	Laporan Evaluasi dan Pemantauan Pelaksanaan Laporan Program/Kebijakan Pengembangan Industri Inspektorat I	1 Laporan	283.456.000	8 Unit Kerja
10	Laporan Evaluasi dan Pemantauan Pelaksanaan Laporan Program/Kebijakan Pengembangan Industri Inspektorat II	1 Laporan	279.005.000	9 Unit Kerja
11	Laporan Evaluasi dan Pemantauan Pelaksanaan Laporan Program/Kebijakan Pengembangan Industri Inspektorat III	1 Laporan	298.296.000	8 Unit Kerja
12	Laporan Evaluasi dan Pemantauan Pelaksanaan Laporan Program/Kebijakan Pengembangan Industri Inspektorat IV	1 Laporan	281.192.000	8 Unit Kerja



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

Kementerian Negara/Lembaga : Energi dan Sumber Daya Mineral (020)

No	Unit Eselon I dan Jenis Keluaran Kegiatan yang menjadi SBK	Volume dan Satuan Ukur	Biaya (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
020.02	Inspektorat Jenderal SBK Total Biaya Keluaran 1 Laporan Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	32 Laporan	428.800.000	



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

Kementerian Negara/Lembaga : Perhubungan (022)

No	Unit Eselon I dan Jenis Keluaran Kegiatan yang menjadi SBK	Volume dan Satuan Ukur	Biaya (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
022.02	Inspektorat Jenderal SBK Total Biaya Keluaran			
	1 Laporan Pengawasan pada Wilayah Kerja Inspektorat I	123 Laporan	5.206.903.800	
	2 Laporan Pengawasan pada Wilayah Kerja Inspektorat II	140 Laporan	7.078.714.000	
	3 Laporan Pengawasan pada Wilayah Kerja Inspektorat III	150 Laporan	7.632.159.000	
	4 Laporan Pengawasan pada Wilayah Kerja Inspektorat IV	160 Laporan	7.265.654.000	
	5 Laporan Pengawasan pada Wilayah Kerja Inspektorat Khusus	176 Laporan	6.014.233.400	
022.11	Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan SBK Total Biaya Keluaran			
	1 Laporan Temu Karya Penelitian Perhubungan	1 Laporan	100.400.000	
	2 Laporan Rapat Koordinasi Teknis Penelitian Perhubungan	1 Laporan	882.380.000	
	3 Warta Penelitian Perhubungan	1 Terbitan	83.325.000	
	4 Buku/Jurnal Perpustakaan	1 Buah	67.125.000	
	5 Laporan Hasil Penyelenggaraan Ceramah Ilmiah Badan Litbang Perhubungan	1 Laporan	78.495.000	
	6 Laporan Hasil Penyelenggaraan Roundtable Badan Litbang	1 Laporan	86.545.000	
	7 Laporan Tim Sekretariat Rancangan Standarisasi Nasional Indonesia	1 Laporan	177.500.000	
	8 Pengukuhan Profesor Riset Badan Litbang Perhubungan	1 Orang	137.030.000	
	9 Laporan Hasil Kajian Perorangan	1 Laporan	21.906.000	
	10 Laporan Hasil Kajian Kelompok	1 Laporan	400.020.000	
	11 Laporan Penelitian Swakelola	1 Laporan	800.720.000	



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

Kementerian Negara/Lembaga : Pendidikan Nasional (023)

NO	Unit Eselon I dan Jenis Keluaran Kegiatan yang menjadi SBK	Volume dan Satuan Ukur	Biaya (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
023.02	Inspektorat Jenderal SBK Total Biaya Keluaran			
	1 LHA Komprehensif Wilayah I	8 LHA	952.660.000	
	2 LHA Komprehensif Wilayah II	8 LHA	923.190.000	
	3 LHA Komprehensif Wilayah III	8 LHA	981.325.000	
	4 LHA Komprehensif Wilayah IV	9 LHA	1.024.475.000	
023.03	Ditjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah SBK Indeks Biaya Keluaran			
	1 Unit Sekolah Baru (USB) SMK	1 Sekolah	942.577.690	
	2 Sarana dan Prasarana Sekolah Baru SMK	1 Sekolah	921.609.333	
	3 Ruang Kelas Baru SMK	1 Ruang	108.089.986	
	4 Ruang Praktek Siswa (RPS) SMK	1 Ruang	238.634.207	
023.04	Ditjen Pendidikan Tinggi SBK Total Biaya Keluaran			
	1 Layanan Perpustakaan	12 Bulan	106.500.000	
	2 Organisasi Kemahasiswaan	44 Lembaga	1.634.400.000	
	SBK Indeks Biaya Keluaran			
	1 Kurikulum Prodi Yang Dikembangkan	1 Prodi	27.250.000	
	2 Mahasiswa Baru	1 mahasiswa	608.942	
	3 Layanan Administrasi Pendidikan	1 mahasiswa	212.636	
	4 Layanan Kelas Internasional	1 kelas internas	94.062.000	
	5 Mahasiswa Mengikuti Pelatihan Kewirausahaan	1 mahasiswa	3.809.524	
	6 Hasil Karya PKM Ipteks LBK	1 Judul	50.000.000	
	7 Hasil Penelitian Hibah Bersaing	1 Judul	59.338.300	
	8 Hasil Penelitian Fundamental	1 Judul	44.295.450	
	9 Hasil Penelitian Hibah Pekerti	1 Judul	84.559.600	
	10 Hasil Penelitian Hibah Pasca Sarjana	1 Judul	99.502.500	
	11 Hasil Penelitian Hibah Kompetensi	1 Judul	111.833.152	
	12 Hasil Penelitian Unggulan Strategis Nasional	1 Judul	1.127.494.117	
	13 Hasil Penelitian Kerjasama Luar Negeri dan Publikasi Internasional	1 Judul	234.496.666	
	14 Hasil Penelitian Strategis Nasional	1 Judul	113.367.625	
	15 Hasil Penelitian Disertasi Doktor	1 Judul	63.345.666	
	16 Hasil Penelitian Kerjasama Antar Lembaga dan PT	1 Judul	111.939.000	
	17 Hasil Pelaksanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat Mono Tahun	1 Judul	53.794.411	
	18 Hasil Penelitian RAPID	1 Judul	382.720.588	
	19 Hasil Pelaksanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat Multi Tahun	1 Judul	114.568.125	
	20 Hasil Program Kreatifitas Mahasiswa (PKM)	1 Judul	10.757.600	
023.05	Ditjen Pendidikan Non Formal dan Informal SBK Indeks Biaya Keluaran			
	1 Peserta Didik Yang Menerima Bantuan Rintisan PAUD TPA Cluster Rendah	1 Anak	2.470.000	
	2 Peserta Didik Yang Menerima Bantuan Rintisan PAUD TPA Cluster Sedang	1 Anak	2.498.000	
	3 Peserta Didik Yang Menerima Bantuan Rintisan PAUD TPA Cluster Tinggi	1 Anak	2.558.000	
	4 Peserta Didik Yang Menerima Bantuan Rintisan PAUD KB Cluster Rendah	1 Anak	1.761.000	
	5 Peserta Didik Yang Menerima Bantuan Rintisan PAUD KB Cluster Sedang	1 Anak	1.789.000	
	6 Peserta Didik Yang Menerima Bantuan Rintisan PAUD KB Cluster Tinggi	1 Anak	1.849.000	
	7 Peserta Didik Yang Menerima Bantuan Rintisan PAUD SPS Cluster Rendah	1 Anak	1.523.500	
	8 Peserta Didik Yang Menerima Bantuan Rintisan PAUD SPS Cluster Sedang	1 Anak	1.537.500	
	9 Peserta Didik Yang Menerima Bantuan Rintisan PAUD SPS Cluster Tinggi	1 Anak	1.567.500	



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

Kementerian Negara/Lembaga : Agama (025)

NO	Unit Eselon I dan Jenis Keluaran Kegiatan yang menjadi SBK	Volume dan Satuan Ukur	Biaya (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
025.01	Sekretariat Jenderal SBK Total Biaya Keluaran			
	1 Laporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	5 Laporan	2.772.860.000	
	2 Penetapan Kinerja	11 Naskah	3.164.512.000	
	3 Laporan Kinerja	6 Laporan	1.716.471.800	
025.02	Inspektorat Jenderal SBK Total Biaya Keluaran			
	1 Laporan Hasil Audit Inspektorat Wilayah I	8 Laporan	4.765.032.000	
	2 Laporan Hasil Audit Inspektorat Wilayah II	8 Laporan	4.598.154.000	
	3 Laporan Hasil Audit Inspektorat Wilayah III	10 Laporan	4.700.856.000	
	4 Laporan Hasil Audit Inspektorat Wilayah IV	8 Laporan	4.844.828.000	
	5 Laporan Hasil Audit Inspektorat Wilayah V	9 Laporan	4.600.348.000	
025.03	Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam SBK Total Biaya Keluaran			
	1 Dokumen Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah	5 Dokumen	14.356.418.000	
	2 Lembaga Urusan Agama Islam yang Terbina	4 Lembaga	64.129.339.500	
	3 Lembaga Bidang Pemberdayaan Zakat	5 Lembaga	22.000.247.000	
	4 Lembaga Zakat yang Terbina	3 Lembaga	14.280.687.000	
	5 Dokumen Bidang Sekretariat Ditjen Bimas Islam	4 Dokumen	20.477.069.000	
	6 Penyuluh	90440 Tenaga Penyuluh	11.913.958.000	
	7 Event Nasional	6 Event	6.392.819.000	
	8 Dokumen Bidang Penerangan Agama Islam	5 Dokumen	16.367.455.000	
	9 Lembaga Penerangan Agama Islam yang Terbina	794 Lembaga	21.317.501.000	
	10 Dokumen Bidang Pemberdayaan Wakaf	5 Dokumen	19.565.757.500	
	11 Dokumen Standar Nasional Bidang Wakaf	5 Dokumen	1.869.600.000	
	12 Lembaga Wakaf yang Terbina	3 Lembaga	18.007.825.000	
025.06	Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik SBK Total Biaya Keluaran			
	1 Dokumen Administrasi Set. Ditjen Bimas Katolik	3 Dokumen	8.441.628.000	
	2 Institusi/Lembaga Keagamaan Katolik yang Terbina	335 Penyuluh	4.535.567.000	
025.08	Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha SBK Total Biaya Keluaran			
	1 Tenaga Teknis Keagamaan Buddha yang Terbina	4818 Orang	6.170.740.000	
	2 Dokumen Manajemen dan Administrasi Sekretariat Ditjen Bimas Buddha	5 Dokumen	8.744.620.000	
	3 Lembaga Keagamaan Buddha yang Terbina	734 Lembaga	5.830.160.000	
	4 Upacara Keagamaan Buddha	10 Event	3.171.305.000	



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

Kementerian Negara/Lembaga : Agama (025)

NO	Unit Eselon I dan Jenis Keluaran Kegiatan yang menjadi SBK	Volume dan Satuan Ukur	Biaya (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
	5 Tenaga Pendidik dan Kependidikan	3556 Orang	6.848.750.000	
	6 Lembaga Kependidikan yang Terbina	688 Lembaga	9.151.840.000	
025.09	Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah SBK Total Biaya Keluaran			
	1 Dokumen Standar dan Prosedur Pelayanan Haji dan Umrah	4 Dokumen	3.458.060.000	
	2 Dokumen Seditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah	3 Dokumen	7.903.662.000	
	3 Petugas Haji yang Profesional	1490 Orang	90.810.000.000	
	4 Jemaah Haji yang Terlayani Secara Prima	21100 Orang	1.363.715.000	
	5 Aparat Penyuluh Haji dan Pembimbing Manasik Haji Propinsi yang Terbina	33 Orang	5.951.890.000	
	6 Aparat Penyelenggara Haji Propinsi yang Terbimbing Secara Prima	33 Orang	11.460.000.000	
025.11	Badan Penelitian Pengembangan dan Pendidikan Pelatihan SBK Total Biaya Keluaran			
	1 Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kependidikan dan Tenaga Teknis Keagamaan	47 Angkatan	14.184.960.000	



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

Kementerian Negara/Lembaga : Sosial (027)

NO	Unit Eselon I dan Jenis Keluaran Kegiatan yang menjadi SBK	Volume dan Satuan Ukur	Biaya (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
027.01	Sekretariat Jenderal SBK Total Biaya Keluaran			
1	Tenaga Penyuluh Sosial Berbasis Masyarakat	450 Orang	3.509.086.000	450 Orang
027.04	Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial SBK Indeks Biaya Keluaran			
1	Anak Berhadapan dengan Hukum atau yang Berprilaku Nakal yang Memperoleh Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial di PSMP "Handayani" Jakarta	1 Orang	19.054.850	Periode Pelayanan 1 Tahun per Orang
2	Lanjut Usia yang Memperoleh Pelayanan Sosial di PSTW "Budhi Dharma" Bekasi	1 Orang	11.687.700	Periode Pelayanan 1 Tahun per Orang
3	Penyandang Cacat Rungu Wicara yang Memperoleh Rehabilitasi dan Perlindungan Kesos di PSBRW "Melati" Jakarta	1 Orang	16.012.240	Periode Pelayanan 1 Tahun per Orang
4	Korban Penyalahgunaan Napza yang Mendapat Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial di PSPP "Insyaf" Sumatera Utara	1 Orang	16.319.500	Periode Pelayanan 1 Tahun per Orang
5	Wanita Tuna Susila yang Mendapat Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial di PSKW "Mulya Jaya" Jakarta	1 Orang	12.234.464	Periode Pelayanan 6 Bulan per Orang
6	Anak Berhadapan dengan Hukum atau yang Berprilaku Nakal yang Memperoleh Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial di PSMP "Antasena" Magelang	1 Orang	15.029.710	Periode Pelayanan 1 Tahun per Orang
7	Lanjut Usia yang Memperoleh Pelayanan Sosial di PSTW "Gau Mabaji" Gowa	1 Orang	12.948.720	Periode Pelayanan 1 Tahun per Orang
8	Penyandang Cacat Rungu Wicara yang Memperoleh Rehabilitasi dan Perlindungan Kesos di PSBRW "Efata" Kupang	1 Orang	23.773.270	Periode Pelayanan 1 Tahun per Orang
9	Korban Penyalahgunaan Napza yang Mendapat Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial di PSPP "Galih Pakuan" Bogor	1 Orang	16.809.033	Periode Pelayanan 1 Tahun per Orang
10	Gelandangan dan Pengemis yang Mendapat Rehabilitasi dan Perlindungan Kesos di PSBK "Pangudi Luhur" Bekasi	1 Orang	8.192.207	Periode Pelayanan 6 Bulan per Orang
11	Anak Berhadapan dengan Hukum atau yang Berprilaku Nakal yang Memperoleh Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial di PSMP "Toddopuli" Makasar	1 Orang	24.237.750	Periode Pelayanan 1 Tahun per Orang
12	Penyandang Cacat Mental Eks Psikotik yang Memperoleh Rehabilitasi dan Perlindungan Kesos di Panti Sosial Bina Laras "Dharma Guna" Bengkulu	1 Orang	13.985.500	Periode Pelayanan 1 Tahun per Orang
13	Anak Berhadapan dengan Hukum atau yang Berprilaku Nakal yang Memperoleh Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial di PSMP "Paramita" Mataram	1 Orang	20.658.350	Periode Pelayanan 1 Tahun per Orang
14	Penyandang Cacat Mental Eks Psikotik yang Memperoleh Rehabilitasi dan Perlindungan Kesos di Panti Sosial Bina Laras "Phala Martha" Sukabumi	1 Orang	16.676.672	Periode Pelayanan 1 Tahun per Orang
15	Anak Remaja yang Memperoleh Pelayanan Kesos dan Pengembangan Potensi Diri di PSBR "Bambu Apus" Jakarta	1 Orang	8.416.600	Periode Pelayanan 6 Bulan per Orang



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

Kementerian Negara/Lembaga : Sosial (027)

NO	Unit Eselon I dan Jenis Keluaran Kegiatan yang menjadi SBK	Volume dan Satuan Ukur	Biaya (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
16	Penyandang Cacat Mental Eks Psikotik yang Memperoleh Rehabilitasi dan Perlindungan Kesos di Panti Sosial Bina Laras "Budi Luhur" Banjarbaru	1 Orang	14.452.450	Periode Pelayanan 1 Tahun per Orang
17	Anak Remaja yang Memperoleh Pelayanan Kesos dan Pengembangan Potensi Diri di PSBR "Rumbai" Pekanbaru	1 Orang	11.514.750	Periode Pelayanan 6 Bulan per Orang
18	Penyandang Cacat Netra yang Memperoleh Rehabilitasi dan Perlindungan Kesos di PSBN "Wyata Guna" Bandung	1 Orang	12.237.840	Periode Pelayanan 1 Tahun per Orang
19	Anak Remaja yang Memperoleh Pelayanan Kesos dan Pengembangan Potensi Diri di PSBR "Nai Bonat" Kupang	1 Orang	18.353.640	Periode Pelayanan 6 Bulan per Orang
20	Penyandang Cacat Netra yang Memperoleh Rehabilitasi dan Perlindungan Kesos di PSBN "Tan Miyat" Bekasi	1 Orang	15.878.000	Periode Pelayanan 1 Tahun per Orang
21	Anak yang Mengalami Hambatan Penyesuaian Diri yang Memperoleh Pelayanan Kesos di PSPA "Satria" Baturaden	1 Orang	1.406.850	Periode Pelayanan 1 Bulan per Orang
22	Penyandang Cacat Netra yang Memperoleh Rehabilitasi dan Perlindungan Kesos di PSBN "Tu Mou Tou" Manado	1 Orang	15.345.760	Periode Pelayanan 1 Tahun per Orang
23	Anak Terlantar atau Tanpa Asuhan Orang Tua yang Memperoleh Pelayanan Kesos di PSAA "Tunas Bangsa" Pati	1 Orang	18.883.647	Periode Pelayanan 1 Tahun per Orang
24	Penyandang Cacat Netra yang Memperoleh Rehabilitasi dan Perlindungan Kesos di PSBN "Mahatmiya" Tabanan Bali	1 Orang	13.554.464	Periode Pelayanan 1 Tahun per Orang
25	Anak Terlantar atau Tanpa Asuhan Orang Tua yang Memperoleh Pelayanan Kesos di PSAA "Alyatama" Jambi	1 Orang	18.029.895	Periode Pelayanan 1 Tahun per Orang
26	Penyandang Cacat Grahita yang Memperoleh Rehabilitasi dan Perlindungan Kesos di PSBG "Ciung Wanara" Bogor	1 Orang	14.627.733	Periode Pelayanan 1 Tahun per Orang
27	Penyandang Cacat Grahita yang Memperoleh Rehabilitasi dan Perlindungan Kesos di BBRSBG "Kartini" Temanggung	1 Orang	12.515.000	Periode Pelayanan 1 Tahun per Orang
28	Penyandang Cacat Grahita yang Memperoleh Rehabilitasi dan Perlindungan Kesos di PSBG "Nipotowe" Palu	1 Orang	16.608.770	Periode Pelayanan 1 Tahun per Orang
29	Penyandang Cacat Tubuh yang Memperoleh Rehabilitasi dan Perlindungan Kesos di BBRVBD Cibinong	1 Orang	16.317.667	Periode Pelayanan 1 Tahun per Orang
30	Penyandang Cacat Tubuh yang Memperoleh Rehabilitasi dan Perlindungan Kesos di BBRSBG "Prof Dr Soeharso" Surakarta	1 Orang	17.412.936	Periode Pelayanan 1 Tahun per Orang
31	Penyandang Cacat Tubuh yang Memperoleh Rehabilitasi dan Perlindungan Kesos di PSBD "Bahagia" Sumatera Utara	1 Orang	15.876.938	Periode Pelayanan 1 Tahun per Orang
32	Penyandang Cacat Tubuh yang Memperoleh Rehabilitasi dan Perlindungan Kesos di PSBD "Budi Perkasa" Palembang	1 Orang	16.586.717	Periode Pelayanan 1 Tahun per Orang
33	Penyandang Cacat Tubuh yang Memperoleh Rehabilitasi dan Perlindungan Kesos di PSBD "Wirajaya" Makassar	1 Orang	13.792.710	Periode Pelayanan 1 Tahun per Orang
34	Penyandang Cacat Eks Penyakit Kronis yang Memperoleh Rehabilitasi dan Perlindungan Kesos di PSBPLK "Wasana Bahagia" Ternate	1 Orang	19.965.000	Periode Pelayanan 1 Tahun per Orang



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

Kementerian Negara/Lembaga : Sosial (027)

NO	Unit Eselon I dan Jenis Keluaran Kegiatan yang menjadi SBK	Volume dan Satuan Ukur	Biaya (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
027.05	Direktorat Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial SBK Total Biaya Keluaran			
1	Korban Tindak Kekerasan yang Terlindungi di RPTC Bambu Apus	750 Orang	1.353.352.000	750 Orang per Tahun
027.11	Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial SBK Total Biaya Keluaran			
1	TKSP yang telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Manajemen Pelayanan Pekerjaan Sosial di BBPPKS Padang	60 Orang	338.820.000	30 Orang / Angkatan
2	TKSP yang telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Manajemen Pelayanan Pekerjaan Sosial di BBPPKS Bandung	60 Orang	309.680.000	30 Orang / Angkatan
3	TKSP yang telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Manajemen Pelayanan Pekerjaan Sosial di BBPPKS Yogyakarta	60 Orang	379.980.000	30 Orang / Angkatan
4	TKSP yang telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Manajemen Pelayanan Pekerjaan Sosial di BBPPKS Banjarmasin	60 Orang	302.940.000	30 Orang / Angkatan
5	TKSP yang telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Manajemen Pelayanan Pekerjaan Sosial di BBPPKS Makassar	60 Orang	356.000.000	30 Orang / Angkatan
6	TKSP yang telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Manajemen Pelayanan Pekerjaan Sosial di BBPPKS Jayapura	60 Orang	707.570.000	30 Orang / Angkatan
7	TKSM yang telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Manajemen Pelayanan Pekerjaan Sosial di BBPPKS Padang	60 Orang	348.780.000	30 Orang / Angkatan
8	TKSM yang telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Manajemen Pelayanan Pekerjaan Sosial di BBPPKS Bandung	60 Orang	320.450.000	30 Orang / Angkatan
9	TKSM yang telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Manajemen Pelayanan Pekerjaan Sosial di BBPPKS Yogyakarta	60 Orang	389.940.000	30 Orang / Angkatan
10	TKSM yang telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Manajemen Pelayanan Pekerjaan Sosial di BBPPKS Banjarmasin	60 Orang	312.900.000	30 Orang / Angkatan
11	TKSM yang telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Manajemen Pelayanan Pekerjaan Sosial di BBPPKS Makassar	60 Orang	365.960.000	30 Orang / Angkatan
12	TKSM yang telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Manajemen Pelayanan Pekerjaan Sosial di BBPPKS Jayapura	60 Orang	717.036.000	30 Orang / Angkatan
	SBK Indeks Biaya Keluaran			
1	Mahasiswa Program D.IV Pekerjaan Sosial	1 Mahasiswa	5.538.480	1365 Mahasiswa Program D.IV per Tahun
2	Pekerja Sosial yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan TOT Manajemen Pelayanan Kesos di Pusdiklat Kesos	1 Orang	9.548.400	30 Orang / Angkatan
3	Mahasiswa Program Pasca Sarjana (SP-1) Pekerjaan Sosial	1 Mahasiswa	24.989.692	65 Mahasiswa Program SP-1 per Tahun



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

Kementerian Negara/Lembaga : Pekerjaan Umum (033)

No	Unit Eselon I dan Jenis Keluaran Kegiatan yang menjadi SBK	Volume dan Satuan Ukur	Biaya (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
033.01	Sekretariat Jenderal SBK Total Biaya Keluaran			
	1 Sistem Pelaporan Secara Elektronik (e-Monitoring) Satuan Kerja Kementerian Pekerjaan Umum Paket I	28 Laporan	20.774.000	Paket I adalah Paket 1-10
	2 Sistem Pelaporan Secara Elektronik (e-Monitoring) Satuan Kerja Kementerian Pekerjaan Umum Paket II	28 Laporan	25.219.000	Paket II adalah Paket 11-20
	3 Sistem Pelaporan Secara Elektronik (e-Monitoring) Satuan Kerja Kementerian Pekerjaan Umum Paket III	28 Laporan	41.102.000	Paket III adalah Paket 21-40
	4 Sistem Pelaporan Secara Elektronik (e-Monitoring) Satuan Kerja Kementerian Pekerjaan Umum Paket IV	28 Laporan	47.654.000	Paket IV adalah Paket 41-60
	5 Sistem Pelaporan Secara Elektronik (e-Monitoring) Satuan Kerja Kementerian Pekerjaan Umum Paket V	28 Laporan	68.342.000	Paket V adalah Paket >60
033.02	Inspektorat Jenderal SBK Total Biaya Keluaran			
	1 Laporan Pelaksanaan Pemeriksaan Rutin (Kinerja, Serentak, Keteknikan) di Wilayah I	140 LHP	10.921.540.000	
	2 Laporan Pelaksanaan Pemeriksaan Rutin (Kinerja, Serentak, Keteknikan) di Wilayah II	84 LHP	6.142.346.000	
	3 Laporan Pelaksanaan Pemeriksaan Rutin (Kinerja, Serentak, Keteknikan) di Wilayah III	140 LHP	11.872.700.000	
	4 Laporan Pelaksanaan Pemeriksaan Rutin (Kinerja, Serentak, Keteknikan) di Wilayah IV	98 LHP	9.381.540.000	
033.13	Badan Pembinaan Konstruksi dan Sumber Daya Manusia SBK Total Biaya Keluaran			
	1 Penyelenggaraan Pelatihan Keahlian Konstruksi	1 Angkatan	135.980.000	
	2 Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi	33 Angkatan	6.143.304.250	
	3 Penyelenggaraan Pelayanan Teknis dan Administrasi Pembinaan Jasa Konstruksi	1 Angkatan	178.660.000	



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

Kementerian Negara/Lembaga : Badan Usaha Milik Negara (041)

No	Unit Eselon I dan Jenis Keluaran Kegiatan yang menjadi SBK	Volume dan Satuan Ukur	Biaya (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
041.01	Kementerian Badan Usaha Milik Negara SBK Total Biaya Keluaran 1 Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Direksi dan Komisaris BUMN	252 Orang	3.425.699.008	Untuk 14 BUMN



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

Kementerian Negara/Lembaga : Lingkungan Hidup (043)

NO	Unit Eselon I dan Jenis Keluaran Kegiatan yang menjadi SBK	Volume dan Satuan Ukur	Biaya (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
043.01	Kementerian Negara Lingkungan Hidup			
	SBK Total Biaya Keluaran			
	1 Propinsi yang Menjadi Lokasi Monitoring Evaluasi dan Pembinaan Penerapan SPM Bidang LH	33 Propinsi	1.961.365.000	
	2 Kota Besar dan Metropolitan yang Menjadi Target Pengurangan Volume Sampah Melalui 3 R (Reduce, Reuse, Recycle) dalam Skala Kota untuk Kota Besar dan Metropolitan	26 Kota	1.459.120.000	
	3 Industri Pertambangan, Energi, dan Migas yang Dipantau dan Diawasi	169 Industri	4.202.401.000	
	4 Industri Manufaktur yang Dipantau dan Diawasi	289 Industri	6.405.044.000	
	5 Agroindustri yang Dipantau dan Diawasi	230 Industri	10.044.942.000	
	6 Kota yang Dievaluasi Kualitas Udaranya	26 Kota	13.542.753.500	
	7 Kota yang Dipantau (Adipura)	26 Kota	3.593.711.600	
	8 Perusahaan yang Mendapat Pengawasan Kinerja Penataan Pengelolaan B3 dan Limbah B3 Kegiatan Pertambangan, Energi, Minyak dan Gas	248 Perusahaan	9.648.935.000	
	9 Industri Manufaktur dan Agro yang Menjadi Target Pengawasan Kinerja Industri Yang Dilakukan pembinaan dan Pengawasan	468 Industri	9.008.883.000	
	SBK Indeks Biaya Keluaran			
	1 Peraturan Perundangan yang di Tetapkan	1 Peraturan Perundangan	422.198.000	
	2 Kebijakan Sektor yang Difasilitasi dalam Mendukung Reduksi Emisi	1 Kebijakan Sektor	1.434.265.500	
	3 Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	1 Peringkat Kinerja	3.953.874	
	4 Peraturan Perundang-undangan yang Disusun Terutama yang Terkait dengan Pelaksanaan UU No.32 Tahun 2009 dan UU No.18 Tahun 2008	1 Peraturan Perundangan	407.972.000	
	5 Perda Lingkungan Provinsi, Kab/Kota yang Dievaluasi Melalui Kerjasama Antara Depdagri, Hukum dan HAM dan KLH	1 Perda	60.310.000	
	6 Komisi Penilai AMDAL/Institusi lingkungan Daerah yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Komisi Penilai Amdal /Institusi Lingkungan Hidup	75.403.333	
	7 Kabupaten/Kota yang Menerapkan Pedoman Monitoring dan Evaluasi Kapasitas Kelembagaan LH daerah	1 Kab./kota	21.940.500	
	8 Provinsi yang Difasilitasi dalam Mengimplementasikan KLHS dalam RTRW dan atau RPJMD	1 Provinsi	64.500.000	
	9 Berkas Penyelesaian Kasus Tindak Pidana LH yang Ditindaklanjuti Melalui Proses Penyelidikan dan Penyidikan (Pulbaket) Sampai proses Pengadilan	1 Berkas	107.336.600	
	10 Rekomendasi Penanganan Pengaduan Masyarakat yang Dikelola Melalui Penerimaan, Penelaahan, dan Klasifikasi Penerusan Kepada Pihak Terkait yang Berwenang atau Ditangani Langsung	1 Rekomendasi	49.647.200	
	11 Laporan Penyelesaian Kasus Perdata LH yang Ditindaklanjuti Secara Perdata di Dalam Pengadilan	1 Laporan	52.964.300	
	12 Laporan Penyelesaian Kasus Perdata LH yang ditindaklanjuti Secara Perdata di Luar Pengadilan	1 Laporan	56.620.300	



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

Kementerian Negara/Lembaga : Perencanaan Pembangunan Nasional. (055)

NO	Unit Eselon I dan Jenis Keluaran Kegiatan yang menjadi SBK	Volume dan Satuan Ukur	Biaya (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
055.01	Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas SBK Indeks Biaya Keluaran			
1	Orang Terlatih dalam Bahasa Perancis	1 Orang	26.772.500	
2	Orang Terlatih dalam Bahasa Jepang	1 Orang	6.944.000	
3	Orang Terlatih dalam Bahasa Inggris	1 Orang	16.717.500	
4	Orang Terlatih Perencana Pertama <i>Cost Sharing Type III</i>	1 Orang	26.053.250	
5	Orang Terlatih Perencana Muda <i>Cost Sharing Type III</i>	1 Orang	20.200.250	
6	Orang Terlatih Perencana Madya <i>Cost Sharing Type III</i>	1 Orang	11.803.250	
7	Orang Terlatih Perencana Utama <i>Cost Sharing Type III</i>	1 Orang	31.249.500	
8	Orang Terlatih Perencana Pertama <i>Cost Sharing Type IV</i>	1 Orang	12.643.000	
9	Orang Terlatih Perencana Muda <i>Cost Sharing Type IV</i>	1 Orang	9.943.000	
10	Orang Terlatih Perencana Madya <i>Cost Sharing Type IV</i>	1 Orang	6.092.000	
11	Orang Terlatih Perencana Utama <i>Cost Sharing Type IV</i>	1 Orang	24.292.500	
12	Orang Terlatih Perencana Pembangunan Daerah	1 Orang	7.667.000	
13	Orang Terlatih Perencana <i>Green Economy</i>	1 Orang	7.667.000	
14	Orang Terlatih Perencana Pengembangan Ekonomi Lokal	1 Orang	7.667.000	
15	Orang Terlatih Perencana Kerjasama Pemerintah Swasta	1 Orang	7.667.000	
16	Orang Terlatih Perencana dan Penganggaran yang Berpihak pada Masyarakat Miskin	1 Orang	7.667.000	
17	Orang Terlatih yang Mampu Mengajar dalam Diklat Perencana Kerjasama Pemerintah Swasta	1 Orang	7.667.000	
18	Orang Terlatih yang Mampu Mengajar dalam Diklat Perencana untuk Pengembangan Ekonomi Lokal	1 Orang	7.667.000	
19	Orang Terlatih yang Mampu Mengajar dalam Diklat Fungsional Penjenjangan	1 Orang	5.937.000	



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

Kementerian Negara/Lembaga : Badan Pengawasan Obat dan Makanan (063)

NO	Unit Eselon I dan Jenis Keluaran Kegiatan yang menjadi SBK	Volume dan Satuan Ukur	Biaya (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
063.01	Badan Pengawasan Obat dan Makanan SBK Indeks Biaya Keluaran 1 Produk Obat dan Makanan yang Disampel dan Diuji	1 Sampel	579.000	



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

Kementerian Negara/Lembaga : Badan Narkotika Nasional (066)

NO	Unit Eselon I dan Jenis Keluaran Kegiatan yang menjadi SBK	Volume dan Satuan Ukur	Biaya (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
066.01	Badan Narkotika Nasional SBK Indeks Biaya Keluaran 1 Pemeriksaan Uji Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Bahan Adiktif Lainnya 2 Korban Penyalahgunaan dan Pencandu Narkoba yang Mendapat Pelayanan Terapi dan Rehabilitasi Medis dan Sosial	1 Laporan 1 Orang	255.000 38.977.000	Pengujian Narkotika, Psikotropika dan Prekursor



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

Kementerian Negara/Lembaga : Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (068)

NO	Unit Eselon I dan Jenis Keluaran Kegiatan yang menjadi SBK	Volume dan Satuan Ukur	Biaya (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
068.01	Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional SBK Total Biaya Keluaran 1 Status Laporan Keuangan (WTP) 2 Laporan Pengendalian Program Kependudukan dan KB 3 Mitra Kerja yang Bekerjasama dengan BKKBN dalam Melaksanakan Pembinaan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	1 Laporan 6 Laporan 3 Mitra	1.426.788.000 1.770.500.000 1.489.260.000	



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

Kementerian Negara/Lembaga : Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (075)

NO	Unit Eselon I dan Jenis Keluaran Kegiatan yang menjadi SBK	Volume dan Satuan Ukur	Biaya (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
075.01	Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika SBK Indeks Biaya Keluaran			
	1 Buku Informasi Perubahan Iklim dan Kualitas Udara	1 Buku	277.023.000	
	2 Buku Prakiraan Musim Hujan dan Kemarau	1 Buku	431.124.500	



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

Kementerian Negara/Lembaga : Mahkamah Konstitusi (077)

No	Unit Eselon I dan Jenis Keluaran Kegiatan yang menjadi SBK	Volume dan Satuan Ukur	Biaya (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
077.01	Mahkamah Konstitusi SBK Total Biaya Keluaran 1 Penanganan Perkara PUU, SKLN dan Perkara Lainnya yang Diputus 2 Penanganan Perkara PHPU Pilgub, Pilbup dan Walikota yang Diputus	90 Perkara 70 Perkara	30.614.625.000 24.385.375.000	



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 36 -

Kementerian Negara/Lembaga : Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (079)

NO	Unit Eselon I dan Jenis Keluaran Kegiatan yang menjadi SBK	Volume dan Satuan Ukur	Biaya (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
079.01	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia SBK Total Biaya Keluaran			
1	Pemanfaatan dan Pemasangan Radar Pengawas Pantai (Surveillance Radar)	2 Dokumen/ Prototipe	1.000.000.000	
2	Pembinaan Peneliti Nasional	2 Dokumen	1.152.124.000	
3	Data Potensi Bahan Obat dari Makro Algae dan Sponge, Biota Laut Potensial Terumbu Karang, Abalon, dan Rajungan serta Sistem Informasi Oseanografi	2 Dokumen/ Produk	8.427.225.000	



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 37 -

Kementerian Negara/Lembaga : Badan Tenaga Nuklir Nasional (080)

NO	Unit Eselon I dan Jenis Keluaran Kegiatan yang menjadi SBK	Volume dan Satuan Ukur	Biaya (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
080.01	Badan Tenaga Nuklir Nasional SBK Indeks Biaya Keluaran 1 Dokumen Standar BATAN (SB) 2 Dokumen Sertifikasi Sistem Mutu 3 Dokumen Akreditasi Laboratorium BATAN 4 Laporan Data Radioaktivitas Lingkungan Kawasan Nuklir Serpong 5 Laporan Data Dosis Radiasi Eksternal dan Data Dosis Radiasi Internal yang Diterima Pekerja Radiasi di Kawasan 6 Laporan Hasil Uji Profesiensi Laboratorium Pengukuran Radioaktivitas di Lingkungan BATAN	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan	63.248.000 61.006.000 61.006.000 64.753.000 50.734.000 127.300.000	



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 38 -

Kementerian Negara/Lembaga : Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (082)

NO	Unit Eselon I dan Jenis Keluaran Kegiatan yang menjadi SBK	Volume dan Satuan Ukur	Biaya (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
082.01	Lembaga Penerbangan dan Antariksa SBK Total Biaya Keluaran 1 Pelayanan Informasi Cuaca Antariksa Kepada Pengguna	4 Layanan	484.127.000	



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 39 -

Kementerian Negara/Lembaga : Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional (083)

NO	Unit Eselon I dan Jenis Keluaran Kegiatan yang menjadi SBK	Volume dan Satuan Ukur	Biaya (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
083.01	Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional SBK Indeks Biaya Keluaran 1 Dokumen Standar Nasional Indonesia (SNI)	1 Dokumen	178.832.000	



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 40 -

Kementerian Negara/Lembaga : Badan Pengawas Tenaga Nuklir (085)

NO	Unit Eselon I dan Jenis Keluaran Kegiatan yang menjadi SBK	Volume dan Satuan Ukur	Biaya (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
085.01	Badan Pengawas Tenaga Nuklir (085)			
	SBK Total Biaya Keluaran			
	1 Laporan Penyelenggaraan Inspeksi Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif	500 Laporan	1.316.490.240	Inspeksi Keselamatan Radiasi dan Zat Radioaktif
	2 Laporan Penyelenggaraan Inspeksi Keselamatan, Keamanan dan Selfgard Instalasi dan Bahan Nuklir	500 Laporan	771.040.000	Inspeksi Keselamatan Nuklir



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIC INDONESIA

- 41 -

Kementerian Negara/Lembaga : Arsip Nasional Republik Indonesia (087)

NO	Unit Eselon I dan Jenis Keluaran Kegiatan yang menjadi SBK	Volume dan Satuan Ukur	Biaya (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
087.01	Arsip Nasional SBK Total Biaya Keluaran 1 Arsip yang Dipelihara dan Diselamatkan	21305 Reel/Roll/Kaset	1.388.059.000	



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 42 -

Kementerian Negara/Lembaga : Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (089)

NO	Unit Eselon I dan Jenis Keluaran Kegiatan yang menjadi SBK	Volume dan Satuan Ukur	Biaya (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
089.01	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan			
	SBK Indeks Biaya Keluaran			6 orang / 29 hari
1	Laporan Hasil Pengawasan Kegiatan Audit DKI Jakarta I	1 Laporan	44.060.000	
2	Laporan Hasil Pengawasan Kegiatan Audit DKI Jakarta II	1 Laporan	57.325.000	
3	Laporan Hasil Pengawasan Kegiatan Audit Jawa Barat	1 Laporan	60.585.000	
4	Laporan Hasil Pengawasan Kegiatan Audit Jawa Tengah	1 Laporan	56.950.000	
5	Laporan Hasil Pengawasan Kegiatan Audit D.I. Yogyakarta	1 Laporan	61.050.000	
6	Laporan Hasil Pengawasan Kegiatan Audit Jawa Timur	1 Laporan	55.950.000	
7	Laporan Hasil Pengawasan Kegiatan Audit Aceh	1 Laporan	56.675.000	
8	Laporan Hasil Pengawasan Kegiatan Audit Sumatera Utara	1 Laporan	53.550.000	
9	Laporan Hasil Pengawasan Kegiatan Audit Sumatera Barat	1 Laporan	51.475.000	
10	Laporan Hasil Pengawasan Kegiatan Audit Riau	1 Laporan	59.215.000	
11	Laporan Hasil Pengawasan Kegiatan Audit Jambi	1 Laporan	51.095.000	
12	Laporan Hasil Pengawasan Kegiatan Audit Sumatera Selatan	1 Laporan	54.725.000	
13	Laporan Hasil Pengawasan Kegiatan Audit Lampung	1 Laporan	49.625.000	
14	Laporan Hasil Pengawasan Kegiatan Audit Kalimantan Barat	1 Laporan	58.005.000	
15	Laporan Hasil Pengawasan Kegiatan Audit Kalimantan Selatan	1 Laporan	62.175.000	
16	Laporan Hasil Pengawasan Kegiatan Audit Kalimantan Timur	1 Laporan	73.825.000	
17	Laporan Hasil Pengawasan Kegiatan Audit Sulawesi Utara	1 Laporan	60.525.000	
18	Laporan Hasil Pengawasan Kegiatan Audit Sulawesi Tengah	1 Laporan	54.695.000	
19	Laporan Hasil Pengawasan Kegiatan Audit Sulawesi Selatan	1 Laporan	60.300.000	
20	Laporan Hasil Pengawasan Kegiatan Audit Sulawesi Tenggara	1 Laporan	57.500.000	
21	Laporan Hasil Pengawasan Kegiatan Audit Maluku	1 Laporan	68.825.000	
22	Laporan Hasil Pengawasan Kegiatan Audit Bali	1 Laporan	90.975.000	
23	Laporan Hasil Pengawasan Kegiatan Audit Nusa Tenggara Timur	1 Laporan	67.300.000	
24	Laporan Hasil Pengawasan Kegiatan Audit Irian Jaya	1 Laporan	87.570.000	
25	Laporan Hasil Pengawasan Kegiatan Audit Bengkulu	1 Laporan	58.435.000	
	SBK Indeks Biaya Keluaran			6 orang / 30 hari
1	Laporan Hasil Pengawasan Kegiatan Evaluasi DKI Jakarta I	1 Laporan	44.060.000	
2	Laporan Hasil Pengawasan Kegiatan Evaluasi DKI Jakarta II	1 Laporan	58.325.000	
3	Laporan Hasil Pengawasan Kegiatan Evaluasi Jawa Barat	1 Laporan	61.765.000	
4	Laporan Hasil Pengawasan Kegiatan Evaluasi Jawa Tengah	1 Laporan	58.000.000	
5	Laporan Hasil Pengawasan Kegiatan Evaluasi D.I. Yogyakarta	1 Laporan	61.590.000	
6	Laporan Hasil Pengawasan Kegiatan Evaluasi Jawa Timur	1 Laporan	56.900.000	
7	Laporan Hasil Pengawasan Kegiatan Evaluasi Aceh	1 Laporan	57.825.000	
8	Laporan Hasil Pengawasan Kegiatan Evaluasi Sumatera Utara	1 Laporan	54.400.000	
9	Laporan Hasil Pengawasan Kegiatan Evaluasi Sumatera Barat	1 Laporan	52.375.000	
10	Laporan Hasil Pengawasan Kegiatan Evaluasi Riau	1 Laporan	60.185.000	
11	Laporan Hasil Pengawasan Kegiatan Evaluasi Jambi	1 Laporan	51.955.000	
12	Laporan Hasil Pengawasan Kegiatan Evaluasi Sumatera Selatan	1 Laporan	55.525.000	
13	Laporan Hasil Pengawasan Kegiatan Evaluasi Lampung	1 Laporan	50.525.000	
14	Laporan Hasil Pengawasan Kegiatan Evaluasi Kalimantan Barat	1 Laporan	59.045.000	
15	Laporan Hasil Pengawasan Kegiatan Evaluasi Kalimantan Selatan	1 Laporan	63.175.000	
16	Laporan Hasil Pengawasan Kegiatan Evaluasi Kalimantan Timur	1 Laporan	74.925.000	
17	Laporan Hasil Pengawasan Kegiatan Evaluasi Sulawesi Utara	1 Laporan	61.425.000	
18	Laporan Hasil Pengawasan Kegiatan Evaluasi Sulawesi Tengah	1 Laporan	55.505.000	
19	Laporan Hasil Pengawasan Kegiatan Evaluasi Sulawesi Selatan	1 Laporan	61.450.000	
20	Laporan Hasil Pengawasan Kegiatan Evaluasi Sulawesi Tenggara	1 Laporan	58.400.000	
21	Laporan Hasil Pengawasan Kegiatan Evaluasi Maluku	1 Laporan	69.725.000	
22	Laporan Hasil Pengawasan Kegiatan Evaluasi Bali	1 Laporan	92.475.000	
23	Laporan Hasil Pengawasan Kegiatan Evaluasi Nusa Tenggara Timur	1 Laporan	68.200.000	
24	Laporan Hasil Pengawasan Kegiatan Evaluasi Irian Jaya	1 Laporan	88.630.000	
25	Laporan Hasil Pengawasan Kegiatan Evaluasi Bengkulu	1 Laporan	59.315.000	



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 43 -

Kementerian Negara/Lembaga : Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (089)

NO	Unit Eselon I dan Jenis Keluaran Kegiatan yang menjadi SBK	Volume dan Satuan Ukur	Biaya (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
	SBK Indeks Biaya Keluaran			6 orang / 23 hari
1	Laporan Hasil Pengawasan Kegiatan Reviu DKI Jakarta I	1 Laporan	37.160.000	
2	Laporan Hasil Pengawasan Kegiatan Reviu DKI Jakarta II	1 Laporan	44.325.000	
3	Laporan Hasil Pengawasan Kegiatan Reviu Jawa Barat	1 Laporan	46.385.000	
4	Laporan Hasil Pengawasan Kegiatan Reviu Jawa Tengah	1 Laporan	43.750.000	
5	Laporan Hasil Pengawasan Kegiatan Reviu D.I. Yogyakarta	1 Laporan	47.490.000	
6	Laporan Hasil Pengawasan Kegiatan Reviu Jawa Timur	1 Laporan	43.270.000	
7	Laporan Hasil Pengawasan Kegiatan Reviu Aceh	1 Laporan	43.555.000	
8	Laporan Hasil Pengawasan Kegiatan Reviu Sumatera Utara	1 Laporan	41.750.000	
9	Laporan Hasil Pengawasan Kegiatan Reviu Sumatera Barat	1 Laporan	39.835.000	
10	Laporan Hasil Pengawasan Kegiatan Reviu Riau	1 Laporan	46.935.000	
11	Laporan Hasil Pengawasan Kegiatan Reviu Jambi	1 Laporan	39.615.000	
12	Laporan Hasil Pengawasan Kegiatan Reviu Sumatera Selatan	1 Laporan	43.125.000	
13	Laporan Hasil Pengawasan Kegiatan Reviu Lampung	1 Laporan	38.345.000	
14	Laporan Hasil Pengawasan Kegiatan Reviu Kalimantan Barat	1 Laporan	45.085.000	
15	Laporan Hasil Pengawasan Kegiatan Reviu Kalimantan Selatan	1 Laporan	48.575.000	
16	Laporan Hasil Pengawasan Kegiatan Reviu Kalimantan Timur	1 Laporan	58.625.000	
17	Laporan Hasil Pengawasan Kegiatan Reviu Sulawesi Utara	1 Laporan	47.325.000	
18	Laporan Hasil Pengawasan Kegiatan Reviu Sulawesi Tengah	1 Laporan	43.055.000	
19	Laporan Hasil Pengawasan Kegiatan Reviu Sulawesi Selatan	1 Laporan	46.460.000	
20	Laporan Hasil Pengawasan Kegiatan Reviu Sulawesi Tenggara	1 Laporan	44.900.000	
21	Laporan Hasil Pengawasan Kegiatan Reviu Maluku	1 Laporan	56.945.000	
22	Laporan Hasil Pengawasan Kegiatan Reviu Bali	1 Laporan	70.575.000	
23	Laporan Hasil Pengawasan Kegiatan Reviu Nusa Tenggara Timur	1 Laporan	53.860.000	
24	Laporan Hasil Pengawasan Kegiatan Reviu Irian Jaya	1 Laporan	72.410.000	
25	Laporan Hasil Pengawasan Kegiatan Reviu Bengkulu	1 Laporan	45.435.000	
	SBK Indeks Biaya Keluaran			6 orang / 23 hari
1	Laporan Hasil Pengawasan Kegiatan Pemantauan DKI Jakarta I	1 Laporan	37.160.000	
2	Laporan Hasil Pengawasan Kegiatan Pemantauan DKI Jakarta II	1 Laporan	44.325.000	
3	Laporan Hasil Pengawasan Kegiatan Pemantauan Jawa Barat	1 Laporan	46.385.000	
4	Laporan Hasil Pengawasan Kegiatan Pemantauan Jawa Tengah	1 Laporan	43.750.000	
5	Laporan Hasil Pengawasan Kegiatan Pemantauan D.I. Yogyakarta	1 Laporan	47.490.000	
6	Laporan Hasil Pengawasan Kegiatan Pemantauan Jawa Timur	1 Laporan	43.270.000	
7	Laporan Hasil Pengawasan Kegiatan Pemantauan Aceh	1 Laporan	43.555.000	
8	Laporan Hasil Pengawasan Kegiatan Pemantauan Sumatera Utara	1 Laporan	41.750.000	
9	Laporan Hasil Pengawasan Kegiatan Pemantauan Sumatera Barat	1 Laporan	39.835.000	
10	Laporan Hasil Pengawasan Kegiatan Pemantauan Riau	1 Laporan	46.935.000	
11	Laporan Hasil Pengawasan Kegiatan Pemantauan Jambi	1 Laporan	39.615.000	
12	Laporan Hasil Pengawasan Kegiatan Pemantauan Sumatera Selatan	1 Laporan	43.125.000	
13	Laporan Hasil Pengawasan Kegiatan Pemantauan Lampung	1 Laporan	38.345.000	
14	Laporan Hasil Pengawasan Kegiatan Pemantauan Kalimantan Barat	1 Laporan	45.085.000	
15	Laporan Hasil Pengawasan Kegiatan Pemantauan Kalimantan Selatan	1 Laporan	48.575.000	
16	Laporan Hasil Pengawasan Kegiatan Pemantauan Kalimantan Timur	1 Laporan	58.625.000	
17	Laporan Hasil Pengawasan Kegiatan Pemantauan Sulawesi Utara	1 Laporan	47.325.000	
18	Laporan Hasil Pengawasan Kegiatan Pemantauan Sulawesi Tengah	1 Laporan	43.055.000	
19	Laporan Hasil Pengawasan Kegiatan Pemantauan Sulawesi Selatan	1 Laporan	46.460.000	
20	Laporan Hasil Pengawasan Kegiatan Pemantauan Sulawesi Tenggara	1 Laporan	44.900.000	
21	Laporan Hasil Pengawasan Kegiatan Pemantauan Maluku	1 Laporan	56.945.000	
22	Laporan Hasil Pengawasan Kegiatan Pemantauan Bali	1 Laporan	70.575.000	
23	Laporan Hasil Pengawasan Kegiatan Pemantauan Nusa Tenggara Timur	1 Laporan	53.860.000	
24	Laporan Hasil Pengawasan Kegiatan Pemantauan Irian Jaya	1 Laporan	72.410.000	
25	Laporan Hasil Pengawasan Kegiatan Pemantauan Bengkulu	1 Laporan	45.435.000	



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 44 -

Kementerian Negara/Lembaga : Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (089)

NO	Unit Eselon I dan Jenis Keluaran Kegiatan yang menjadi SBK	Volume dan Satuan Ukur	Biaya (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
	SBK Indeks Biaya Keluaran			4 orang / 7 hari
1	Laporan Hasil Pengawasan Kegiatan Sosialisasi DKI Jakarta I	1 Laporan	12.670.000	
2	Laporan Hasil Pengawasan Kegiatan Sosialisasi DKI Jakarta II	1 Laporan	5.980.000	
3	Laporan Hasil Pengawasan Kegiatan Sosialisasi Jawa Barat	1 Laporan	6.080.000	
4	Laporan Hasil Pengawasan Kegiatan Sosialisasi Jawa Tengah	1 Laporan	5.740.000	
5	Laporan Hasil Pengawasan Kegiatan Sosialisasi D.I. Yogyakarta	1 Laporan	5.890.000	
6	Laporan Hasil Pengawasan Kegiatan Sosialisasi Jawa Timur	1 Laporan	5.740.000	
7	Laporan Hasil Pengawasan Kegiatan Sosialisasi Aceh	1 Laporan	6.330.000	
8	Laporan Hasil Pengawasan Kegiatan Sosialisasi Sumatera Utara	1 Laporan	5.840.000	
9	Laporan Hasil Pengawasan Kegiatan Sosialisasi Sumatera Barat	1 Laporan	5.580.000	
10	Laporan Hasil Pengawasan Kegiatan Sosialisasi Riau	1 Laporan	7.890.000	
11	Laporan Hasil Pengawasan Kegiatan Sosialisasi Jambi	1 Laporan	5.500.000	
12	Laporan Hasil Pengawasan Kegiatan Sosialisasi Sumatera Selatan	1 Laporan	6.400.000	
13	Laporan Hasil Pengawasan Kegiatan Sosialisasi Lampung	1 Laporan	5.500.000	
14	Laporan Hasil Pengawasan Kegiatan Sosialisasi Kalimantan Barat	1 Laporan	6.620.000	
15	Laporan Hasil Pengawasan Kegiatan Sosialisasi Kalimantan Selatan	1 Laporan	6.820.000	
16	Laporan Hasil Pengawasan Kegiatan Sosialisasi Kalimantan Timur	1 Laporan	9.100.000	
17	Laporan Hasil Pengawasan Kegiatan Sosialisasi Sulawesi Utara	1 Laporan	6.340.000	
18	Laporan Hasil Pengawasan Kegiatan Sosialisasi Sulawesi Tengah	1 Laporan	6.370.000	
19	Laporan Hasil Pengawasan Kegiatan Sosialisasi Sulawesi Selatan	1 Laporan	6.460.000	
20	Laporan Hasil Pengawasan Kegiatan Sosialisasi Sulawesi Tenggara	1 Laporan	6.230.000	
21	Laporan Hasil Pengawasan Kegiatan Sosialisasi Maluku	1 Laporan	12.080.000	
22	Laporan Hasil Pengawasan Kegiatan Sosialisasi Bali	1 Laporan	8.640.000	
23	Laporan Hasil Pengawasan Kegiatan Sosialisasi Nusa Tenggara Timur	1 Laporan	8.610.000	
24	Laporan Hasil Pengawasan Kegiatan Sosialisasi Irian Jaya	1 Laporan	14.450.000	
25	Laporan Hasil Pengawasan Kegiatan Sosialisasi Bengkulu	1 Laporan	5.760.000	
	SBK Indeks Biaya Keluaran			7 orang / 32 hari
1	Laporan Hasil Pengawasan Kegiatan Pembimbingan dan Konsultasi DKI Jakarta I	1 Laporan	51.350.000	
2	Laporan Hasil Pengawasan Kegiatan Pembimbingan dan Konsultasi DKI Jakarta II	1 Laporan	75.840.000	
3	Laporan Hasil Pengawasan Kegiatan Pembimbingan dan Konsultasi Jawa Barat	1 Laporan	79.600.000	
4	Laporan Hasil Pengawasan Kegiatan Pembimbingan dan Konsultasi Jawa Tengah	1 Laporan	75.170.000	
5	Laporan Hasil Pengawasan Kegiatan Pembimbingan dan Konsultasi Jawa D.I.Yogyakarta	1 Laporan	82.030.000	
6	Laporan Hasil Pengawasan Kegiatan Pembimbingan dan Konsultasi Jawa Timur	1 Laporan	74.250.000	
7	Laporan Hasil Pengawasan Kegiatan Pembimbingan dan Konsultasi Aceh	1 Laporan	73.760.000	
8	Laporan Hasil Pengawasan Kegiatan Pembimbingan dan Konsultasi Sumatera Utara	1 Laporan	71.170.000	
9	Laporan Hasil Pengawasan Kegiatan Pembimbingan dan Konsultasi Sumatera Barat	1 Laporan	67.980.000	
10	Laporan Hasil Pengawasan Kegiatan Pembimbingan dan Konsultasi Riau	1 Laporan	77.440.000	
11	Laporan Hasil Pengawasan Kegiatan Pembimbingan dan Konsultasi Jambi	1 Laporan	67.700.000	
12	Laporan Hasil Pengawasan Kegiatan Pembimbingan dan Konsultasi Sumatera Selatan	1 Laporan	72.800.000	
13	Laporan Hasil Pengawasan Kegiatan Pembimbingan dan Konsultasi Lampung	1 Laporan	65.280.000	



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 45 -

Kementerian Negara/Lembaga : Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (089)

NO	Unit Eselon I dan Jenis Keluaran Kegiatan yang menjadi SBK	Volume dan Satuan Ukur	Biaya (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
14	Laporan Hasil Pengawasan Kegiatan Pembimbingan dan Konsultasi Kalimantan Barat	1 Laporan	76.160.000	
15	Laporan Hasil Pengawasan Kegiatan Pembimbingan dan Konsultasi Kalimantan Selatan	1 Laporan	82.460.000	
16	Laporan Hasil Pengawasan Kegiatan Pembimbingan dan Konsultasi Kalimantan Timur	1 Laporan	97.600.000	
17	Laporan Hasil Pengawasan Kegiatan Pembimbingan dan Konsultasi Sulawesi Utara	1 Laporan	80.920.000	
18	Laporan Hasil Pengawasan Kegiatan Pembimbingan dan Konsultasi Sulawesi Tengah	1 Laporan	72.720.000	
19	Laporan Hasil Pengawasan Kegiatan Pembimbingan dan Konsultasi Sulawesi Selatan	1 Laporan	79.070.000	
20	Laporan Hasil Pengawasan Kegiatan Pembimbingan dan Konsultasi Sulawesi Tenggara	1 Laporan	76.490.000	
21	Laporan Hasil Pengawasan Kegiatan Pembimbingan dan Konsultasi Maluku	1 Laporan	89.120.000	
22	Laporan Hasil Pengawasan Kegiatan Pembimbingan dan Konsultasi Bali	1 Laporan	121.220.000	
23	Laporan Hasil Pengawasan Kegiatan Pembimbingan dan Konsultasi Nusa Tenggara Timur	1 Laporan	89.370.000	
24	Laporan Hasil Pengawasan Kegiatan Pembimbingan dan Konsultasi Irian Jaya	1 Laporan	114.430.000	
25	Laporan Hasil Pengawasan Kegiatan Pembimbingan dan Konsultasi Bengkulu	1 Laporan	78.340.000	
	SBK Indeks Biaya Keluaran			5 orang / 17 hari
1	Laporan Hasil Pengawasan Kegiatan Bantuan Pengawasan DKI Jakarta I	1 Laporan	20.730.000	
2	Laporan Hasil Pengawasan Kegiatan Bantuan Pengawasan DKI Jakarta II	1 Laporan	21.795.000	
3	Laporan Hasil Pengawasan Kegiatan Bantuan Pengawasan Jawa Barat	1 Laporan	22.615.000	
4	Laporan Hasil Pengawasan Kegiatan Bantuan Pengawasan Jawa Tengah	1 Laporan	21.410.000	
5	Laporan Hasil Pengawasan Kegiatan Bantuan Pengawasan Jawa D.I.Yogyakarta	1 Laporan	23.230.000	
6	Laporan Hasil Pengawasan Kegiatan Bantuan Pengawasan Jawa Timur	1 Laporan	21.270.000	
7	Laporan Hasil Pengawasan Kegiatan Bantuan Pengawasan Aceh	1 Laporan	21.485.000	
8	Laporan Hasil Pengawasan Kegiatan Bantuan Pengawasan Sumatera Utara	1 Laporan	20.710.000	
9	Laporan Hasil Pengawasan Kegiatan Bantuan Pengawasan Sumatera Barat	1 Laporan	19.725.000	
10	Laporan Hasil Pengawasan Kegiatan Bantuan Pengawasan Riau	1 Laporan	23.725.000	
11	Laporan Hasil Pengawasan Kegiatan Bantuan Pengawasan Jambi	1 Laporan	19.625.000	
12	Laporan Hasil Pengawasan Kegiatan Bantuan Pengawasan Sumatera Selatan	1 Laporan	21.575.000	
13	Laporan Hasil Pengawasan Kegiatan Bantuan Pengawasan Lampung	1 Laporan	19.035.000	
14	Laporan Hasil Pengawasan Kegiatan Bantuan Pengawasan Kalimantan Barat	1 Laporan	22.355.000	



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 46 -

Kementerian Negara/Lembaga : Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (089)

NO	Unit Eselon I dan Jenis Keluaran Kegiatan yang menjadi SBK	Volume dan Satuan Ukur	Biaya (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
15	Laporan Hasil Pengawasan Kegiatan Bantuan Pengawasan Kalimantan Selatan	1 Laporan	24.005.000	
16	Laporan Hasil Pengawasan Kegiatan Bantuan Pengawasan Kalimantan Timur	1 Laporan	29.275.000	
17	Laporan Hasil Pengawasan Kegiatan Bantuan Pengawasan Sulawesi Utara	1 Laporan	23.335.000	
18	Laporan Hasil Pengawasan Kegiatan Bantuan Pengawasan Sulawesi Tengah	1 Laporan	21.525.000	
19	Laporan Hasil Pengawasan Kegiatan Bantuan Pengawasan Sulawesi Selatan	1 Laporan	22.820.000	
20	Laporan Hasil Pengawasan Kegiatan Bantuan Pengawasan Sulawesi Tenggara	1 Laporan	22.220.000	
21	Laporan Hasil Pengawasan Kegiatan Bantuan Pengawasan Maluku	1 Laporan	29.855.000	
22	Laporan Hasil Pengawasan Kegiatan Bantuan Pengawasan Bali	1 Laporan	34.085.000	
23	Laporan Hasil Pengawasan Kegiatan Bantuan Pengawasan Nusa Tenggara Timur	1 Laporan	27.120.000	
24	Laporan Hasil Pengawasan Kegiatan Bantuan Pengawasan Irian Jaya	1 Laporan	37.510.000	
25	Laporan Hasil Pengawasan Kegiatan Pembimbingan dan Konsultasi Bengkulu	1 Laporan	22.285.000	
	SBK Indeks Biaya Keluaran			5 orang / 27 hari
1	Laporan Hasil Pengawasan Kegiatan Pendampingan Pengawasan DKI Jakarta I	1 Laporan	30.170.000	
2	Laporan Hasil Pengawasan Kegiatan Pendampingan Pengawasan DKI Jakarta II	1 Laporan	34.810.000	
3	Laporan Hasil Pengawasan Kegiatan Pendampingan Pengawasan Jawa Barat	1 Laporan	36.470.000	
4	Laporan Hasil Pengawasan Kegiatan Pendampingan Pengawasan Jawa Tengah	1 Laporan	34.380.000	
5	Laporan Hasil Pengawasan Kegiatan Pendampingan Pengawasan Jawa D.I.Yogyakarta	1 Laporan	37.090.000	
6	Laporan Hasil Pengawasan Kegiatan Pendampingan Pengawasan Jawa Timur	1 Laporan	33.960.000	
7	Laporan Hasil Pengawasan Kegiatan Pendampingan Pengawasan Aceh	1 Laporan	34.380.000	
8	Laporan Hasil Pengawasan Kegiatan Pendampingan Pengawasan Sumatera Utara	1 Laporan	32.780.000	
9	Laporan Hasil Pengawasan Kegiatan Pendampingan Pengawasan Sumatera Barat	1 Laporan	31.350.000	
10	Laporan Hasil Pengawasan Kegiatan Pendampingan Pengawasan Riau	1 Laporan	37.000.000	
11	Laporan Hasil Pengawasan Kegiatan Pendampingan Pengawasan Jambi	1 Laporan	31.150.000	
12	Laporan Hasil Pengawasan Kegiatan Pendampingan Pengawasan Sumatera Selatan	1 Laporan	33.850.000	
13	Laporan Hasil Pengawasan Kegiatan Pendampingan Pengawasan Lampung	1 Laporan	30.230.000	
14	Laporan Hasil Pengawasan Kegiatan Pendampingan Pengawasan Kalimantan Barat	1 Laporan	35.490.000	
15	Laporan Hasil Pengawasan Kegiatan Pendampingan Pengawasan Kalimantan Selatan	1 Laporan	38.090.000	



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 47 -

Kementerian Negara/Lembaga : Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (089)

NO	Unit Eselon I dan Jenis Keluaran Kegiatan yang menjadi SBK	Volume dan Satuan Ukur	Biaya (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
16	Laporan Hasil Pengawasan Kegiatan Bantuan Pengawasan Kalimantan Timur	1 Laporan	45.950.000	
17	Laporan Hasil Pengawasan Kegiatan Bantuan Pengawasan Sulawesi Utara	1 Laporan	37.030.000	
18	Laporan Hasil Pengawasan Kegiatan Bantuan Pengawasan Sulawesi Tengah	1 Laporan	33.800.000	
19	Laporan Hasil Pengawasan Kegiatan Bantuan Pengawasan Sulawesi Selatan	1 Laporan	36.560.000	
20	Laporan Hasil Pengawasan Kegiatan Bantuan Pengawasan Sulawesi Tenggara	1 Laporan	35.210.000	
21	Laporan Hasil Pengawasan Kegiatan Bantuan Pengawasan Maluku	1 Laporan	44.990.000	
22	Laporan Hasil Pengawasan Kegiatan Bantuan Pengawasan Bali	1 Laporan	55.030.000	
23	Laporan Hasil Pengawasan Kegiatan Bantuan Pengawasan Nusa Tenggara Timur	1 Laporan	42.210.000	
24	Laporan Hasil Pengawasan Kegiatan Bantuan Pengawasan Irian Jaya	1 Laporan	56.930.000	
25	Laporan Hasil Pengawasan Kegiatan Pembimbingan dan Konsultasi Bengkulu	1 Laporan	35.530.000	



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 48 -

Kementerian Negara/Lembaga : Pemuda dan Olahraga (092)

NO	Unit Eselon I dan Jenis Keluaran Kegiatan yang menjadi SBK	Volume dan Satuan Ukur	Biaya (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
092.01	Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga			
	SBK Total Biaya Keluaran			
1	Dokumen Pelaksanaan Pengawasan Kinerja dan Keuangan Sesuai dengan Prosedur	36 LHP/LHA	1.834.076.000	Audit Operasional Dana Dekonsentrasi 33 Provinsi dan Audit Kinerja 3 UPT.
	SBK Indeks Biaya Keluaran			
1	Pemuda Yang Difasilitasi dalam Pendidikan Kepemudaan	1 siswa	48.420.879	Penyelenggaraan Upacara Kenegaraan
2	Pemuda Kader Kepemimpinan	1 Orang	27.509.283	(Paskibraka Nasional). Pendidikan Ketahanan Nasional untuk pemuda.
3	Pembina Pramuka, Penegak, dan Pandega yang Mendapat Fasilitas Pelayanan Kepemudaan	1 Orang	8.362.140	Pelatihan nasional pembina Paskibraka.
4	Peserta Pendidikan Sekolah Olahraga	1 siswa	173.497.340	Penyelenggaraan Diklat SMP/SMA Negeri Ragunan.
5	Sarjana Kader Pembangunan Perdesaan Provinsi Jawa Barat	1 Orang	25.742.917	Sarjana Penggerak Pembangunan di Perdesaan (SP3).
6	Sarjana Kader Pembangunan Perdesaan Provinsi Jawa Tengah	1 Orang	27.788.125	
7	Sarjana Kader Pembangunan Perdesaan Provinsi Jawa Timur	1 Orang	25.871.300	
8	Sarjana Kader Pembangunan Perdesaan Provinsi DKI Jakarta	1 Orang	29.535.500	
9	Sarjana Kader Pembangunan Perdesaan Provinsi Banten	1 Orang	31.788.375	
10	Sarjana Kader Pembangunan Perdesaan Provinsi DI Yogyakarta	1 Orang	28.312.375	
11	Sarjana Kader Pembangunan Perdesaan Provinsi Bali	1 Orang	36.301.792	
12	Sarjana Kader Pembangunan Perdesaan Provinsi Lampung	1 Orang	30.121.500	
13	Sarjana Kader Pembangunan Perdesaan Provinsi Jambi	1 Orang	27.209.125	
14	Sarjana Kader Pembangunan Perdesaan Provinsi Bengkulu	1 Orang	25.941.700	
15	Sarjana Kader Pembangunan Perdesaan Provinsi Bangka Belitung	1 Orang	31.497.750	
16	Sarjana Kader Pembangunan Perdesaan Provinsi Riau	1 Orang	26.093.333	
17	Sarjana Kader Pembangunan Perdesaan Provinsi Sumatera Selatan	1 Orang	27.928.167	
18	Sarjana Kader Pembangunan Perdesaan Provinsi Sumatera Barat	1 Orang	25.617.700	
19	Sarjana Kader Pembangunan Perdesaan Provinsi Sumatera Utara	1 Orang	26.214.583	
20	Sarjana Kader Pembangunan Perdesaan Provinsi Aceh	1 Orang	32.518.375	
21	Sarjana Kader Pembangunan Perdesaan Provinsi Kepulauan Riau	1 Orang	31.526.167	
22	Sarjana Kader Pembangunan Perdesaan Provinsi Sulawesi Selatan	1 Orang	31.611.300	
23	Sarjana Kader Pembangunan Perdesaan Provinsi Sulawesi Barat	1 Orang	28.082.083	
24	Sarjana Kader Pembangunan Perdesaan Provinsi Sulawesi Utara	1 Orang	32.993.607	
25	Sarjana Kader Pembangunan Perdesaan Provinsi Sulawesi Tengah	1 Orang	34.045.500	
26	Sarjana Kader Pembangunan Perdesaan Provinsi Gorontalo	1 Orang	36.139.750	
27	Sarjana Kader Pembangunan Perdesaan Provinsi Nusa Tenggara Barat	1 Orang	30.388.630	
28	Sarjana Kader Pembangunan Perdesaan Provinsi Kalimantan Selatan	1 Orang	30.535.167	
29	Sarjana Kader Pembangunan Perdesaan Provinsi Kalimantan Barat	1 Orang	32.362.833	
30	Sarjana Kader Pembangunan Perdesaan Provinsi Kalimantan Timur	1 Orang	35.758.250	
31	Sarjana Kader Pembangunan Perdesaan Provinsi Kalimantan Tengah	1 Orang	30.369.167	
32	Sarjana Kader Pembangunan Perdesaan Provinsi Maluku	1 Orang	35.593.500	
33	Sarjana Kader Pembangunan Perdesaan Provinsi Maluku Utara	1 Orang	35.045.500	
34	Sarjana Kader Pembangunan Perdesaan Provinsi Nusa Tenggara Timur	1 Orang	33.662.875	
35	Sarjana Kader Pembangunan Perdesaan Provinsi Papua	1 Orang	36.238.167	
36	Sarjana Kader Pembangunan Perdesaan Provinsi Papua Barat	1 Orang	36.348.833	
37	Sarjana Kader Pembangunan Perdesaan Provinsi Sulawesi Tenggara	1 Orang	30.919.750	



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 49 -

Kementerian Negara/Lembaga : Komisi Yudisial (100)

NO	Unit Eselon I dan Jenis Keluaran Kegiatan yang menjadi SBK	Volume dan Satuan Ukur	Biaya (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
100.01	Komisi Yudisial SBK Total Biaya Keluaran 1 Laporan Investigasi Hakim di Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi/ Mahkamah Agung	290 Laporan	1.434.600.000	Investigasi Hakim PN/PT dilaksanakan dalam waktu 30 hari Investigasi Hakim Agung dilaksanakan dalam waktu 40 hari



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 50 -

Kementerian Negara/Lembaga : Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (104)

No	Unit Eselon I dan Jenis Keluaran Kegiatan yang menjadi SBK	Volume dan Satuan Ukur	Biaya (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
104.02	Deputi Bidang Kerja Sama Luar Negeri dan Promosi SBK Total Biaya Keluaran 1 Promosi/Ekspo TKI Profesional (DN)	1 Laporan	479.162.000	
104.03	Deputi Bidang Penempatan SBK Indeks Biaya Keluaran 1 Penerbitan dan Pelayanan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri 2 Pelaksanaan Pembekalan Akhir Pemberangkatan	1 Kartu 1 Orang	50.166 55.230	



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 51 -

Kementerian Negara/Lembaga : Kehutanan (029)

No	Unit Eselon I dan Jenis Keluaran Kegiatan yang menjadi SBK	Volume dan Satuan Ukur	Biaya (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
029.01	Sekretariat Jenderal SBK Indeks Biaya Keluaran			
	1 Gerakan Bakti Penghijauan Pemuda (GBPP)	1 Kelompok	25.000.000	
	2 Kecil Menanam Dewasa Menganan (KMDM) di Sekolah	1 Sekolah	50.000.000	
	3 Laporan Hasil Kegiatan Kampanye Indonesia Menganan	1 Laporan	36.000.000	
	4 Diklat Pembentukan Fungsional Penyuluh Kehutanan Ahli/Terampil	1 Angkatan	319.516.000	
029.03	Ditjen Bina Produksi Kehutanan SBK Indeks Biaya Keluaran			
	1 Diklat Pengawas Tenaga Teknis PHPL Perencanaan Hutan	1 Angkatan	736.555.000	1 Angkatan @ 30 orang, 29 hari
	2 Diklat Pengawas Tenaga Teknis PHPL Pembinaan Hutan	1 Angkatan	766.030.000	1 Angkatan @ 30 orang, 30 hari
	3 Diklat Pengawas Tenaga Teknis PHPL Pemanenan Hutan	1 Angkatan	733.815.000	1 Angkatan @ 30 orang, 28 hari
	4 Diklat Tenaga Teknis PHPL Perencanaan Hutan	1 Angkatan	470.215.000	1 Angkatan @ 30 orang, 17 hari
	5 Diklat Tenaga Teknis PHPL Pembinaan Hutan	1 Angkatan	452.985.000	1 Angkatan @ 30 orang, 16 hari
	6 Diklat Tenaga Teknis PHPL Pemanenan Hutan	1 Angkatan	444.710.000	1 Angkatan @ 30 orang, 15 hari
029.04	Ditjen Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial SBK Indeks Biaya Keluaran			
	1 Areal Tanaman Hasil Rehabilitasi Hutan-Reboisasi pada DAS	1 Ha	7.230.000	
	2 Areal Tanaman Hasil Rehabilitasi Hutan-Reboisasi Pengkayaan pada DAS	1 Ha	3.343.000	
	3 Areal Tanaman Hasil Rehabilitasi Hutan-Hutan Rakyat pada DAS	1 Ha	2.960.000	
	4 Areal Tanaman Hasil Rehabilitasi Hutan-Unit Kebun Bibit Rakyat pada DAS	1 Ha	50.000.000	Penanaman 50.000 batang bibit
	5 Areal Tanaman Hasil Rehabilitasi Hutan Kota pada DAS	1 Ha	5.505.000	
029.05	Ditjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam SBK Indeks Biaya Keluaran			
	1 Perawatan Gajah	1 Ekor	24.985.000	
	2 Latihan Rutin Menembak	1 Angkatan	60.130.000	1 Angkatan @ 20 orang / hari
	3 Layanan Operasional Kapal Patroli	1 Unit/Tahun	2.555.960.000	ukuran 36 m
	4 Layanan Operasional Kapal Pos Terapung	1 Unit/Tahun	519.380.000	ukuran 25
	5 Model Desa Konservasi	1 Desa	249.500.000	
029.06	Ditjen Planologi SBK Indeks Biaya Keluaran			
	1 Data dan Informasi Penggunaan Kawasan Hutan	1 Provinsi	33.745.000	
	2 Data dan Informasi Kawasan Hutan	1 Judul	412.500.000	
	3 Draft SK Menhut tentang Penunjukan Kawasan Hutan Provinsi	1 Draft SK Menhut	48.930.000	
	4 Draft SK Menhut tentang Penunjukan Kawasan Hutan Parsial	1 Draft SK Menhut	47.530.000	
	5 Draft SK Menhut tentang Penetapan Kawasan Hutan yang Telah Ditata Batas Temu Gelang	1 Draft SK Menhut	39.330.000	
	6 Dokumen Rencana Makro Kehutanan	1 Judul	1.042.700.000	
	7 Laporan Evaluasi Rencana Kawasan Kehutanan	1 Judul	512.400.000	
	8 Draft SK Menhut tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)	1 Draft SK Menhut	56.000.000	
	9 Laporan Monev Pembangunan KPH	1 Laporan	709.800.000	
	10 Laporan Evaluasi Wilayah KPH	1 Laporan	52.580.000	
	11 Laporan Pemantauan Serapan dan Emisi Karbon Nasional	1 Laporan	831.635.000	



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 52 -

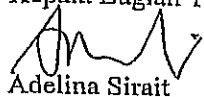
Kementerian Negara/Lembaga : Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (106)

NO	Unit Eselon I dan Jenis Keluaran Kegiatan yang menjadi SBK	Volume dan Satuan Ukur	Biaya (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
106.01	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah			
	SBK Total Biaya Keluaran			
1	Peserta Ujian, Sertifikasi Profesi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	100 Peserta	5.829.616.000	
	SBK Indeks Biaya Keluaran			
1	Kasus dan Permasalahan Hukum yang Mampu Diberikan Bantuan, Nasehat, dan Pendapat Hukum	1 Kasus	17.163.733	
2	Kesaksian Ahli	1 Kasus	19.874.666	

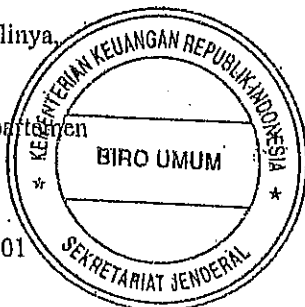
Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum

u.b.

Pj. Kepala Bagian T.U. Departemen


Adelina Sirait

NIP 196606031987032001



MENTERI KEUANGAN

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO



**Gedung Sutikno Slamet Lantai 4 Jl. Wahidin No.1, Jakarta Pusat
Helpdesk : dspdja@gmail.com, Telepon 021-34357115/34357120**